



BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA



2023

LAPORAN KINERJA





**Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Jayapura**

**Laporan
Kinerja
2023**

RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura Tahun 2023 ini disusun untuk melengkapi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura Tahun 2023 yang telah disepakati antara Kepala Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Jayapura dengan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Secara garis besar, LAKIN berfokus pada dua topik besar yaitu: Pertama, Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio dan yang kedua, Pengelolaan Birokrasi yang efektif dan efisien.

Topik yang **pertama** merupakan tujuan Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang ada di seluruh Indonesia sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2022, termasuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura. Dalam pelaksanaan monitoring dan pengendalian spektrum frekuensi radio, diharapkan menghasilkan suatu gambaran yang nyata tentang pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang sesuai dengan ketentuan, peruntukan, tidak saling mengganggu dan lebih dari itu membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Terdapat sejumlah Indikator Kinerja (IK) yang menjadi tolak ukur capaian pelaksanaan monitoring dan pengendalian spektrum frekuensi radio. Indikator tersebut meliputi pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio di setiap kabupaten/kota yang ada di wilayah kerja, di mana Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura mengawasi 24 kabupaten/kota. Kegiatan monitoring merupakan tingkatan paling awal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio karena melaporkan semua pengguna yang berizin atau pun yang belum berizin.

Selanjutnya ada indikator pemeriksaan stasiun radio yang bertujuan melakukan validasi kesesuaian data izin stasiun radio (ISR) yang sudah dimiliki klien dengan penggunaan sesungguhnya di lapangan. Kegiatan pemeriksaan stasiun radio menjadi sangat vital karena banyak potensi gangguan frekuensi radio yang bisa dicegah lebih awal setelah mengetahui hasil pemeriksaan di lapangan.

Setelah itu, ada kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi yang merupakan muara dari kegiatan – kegiatan sebelumnya. Penertiban dengan menghentikan segala pancaran dan melakukan penyegelan terhadap perangkat telekomunikasi yang tidak dilengkapi ISR merupakan wujud nyata pelaksanaan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.

Selain itu, ada beberapa indikator yang bersifat pelayanan publik Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura seperti pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio, Sosialisasi Pelayanan Publik, Bimbingan Teknis SRC/LRC kepada para nelayan, pencegahan sejak dini keterlambatan pembayaran SPP BHP dengan melakukan pendampingan piutang secara intensif kepada klien. Semua kegiatan pelayanan publik ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran kepada masyarakat luas tentang pentingnya menggunakan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian **kedua** dalam LAKIN ini membahas Pengelolaan Birokrasi yang efektif dan efisien di sepanjang tahun 2023. Ada anggaran yang telah dialokasikan untuk mencapai indikator – indikator teknis di atas serta memastikan agar semua perencanaan program kerja berjalan sesuai jadwal yang ada. Pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura senilai **17.655.202.000,-** yang terdiri dari tiga mata anggaran, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura mencapai realisasi penyerapan pada angka **17.202.091.000,-** pada akhir tahun, jumlah ini setara dengan persentase **97.27%**. Tentu harapannya semua penyerapan anggaran ini tidak hanya menjadi angka di atas kertas saja, tetapi setiap anggaran yang telah terpakai memberikan manfaat yang besar utamanya dalam mendukung Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio yang ada di wilayah kerja.

Pengelolaan Birokrasi juga erat kaitannya dengan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) hingga urusan administrasi lainnya yang akan mendukung tugas utama monitoring dan pengendalian spektrum frekuensi radio dan pelayanan publik untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi dalam merealisasikan target indikator kinerja, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis kegiatan, sehingga diharapkan di masa yang akan datang semua capaian kinerja dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokaatuh

Alhamdulillahirabbil'amin, Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura yang telah disusun ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban kinerja kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selain itu, pelaporan ini juga merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat luas atas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien serta akuntabel dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan sejumlah Indikator Capaian yang dituangkan dalam LAKIN Tahun 2023 ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura berharap dapat memberikan gambaran yang obyektif dan terukur tentang kinerja organisasi selama satu tahun anggaran. Capaian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura akan digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian diharapkan kinerja pada masa – masa mendatang akan menjadi lebih baik dari segi produktifitas, efektifitas, efisiensi dan transparansi.

Tak ada gading yang tak retak, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan substansi LAKIN ini dapat tersampaikan dan membawa manfaat sebesar – besarnya bagi organisasi Ditjen SDPPI secara khusus serta Kementerian Komunikasi dan Informatika secara umum.

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pengantar ini,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jayapura, 31 Maret 2024

**KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II JAYAPURA**



Rachim Pribadi, SE, MM

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	04
KATA PENGANTAR	06
DAFTAR ISI	07

01	PENDAHULUAN	
	Latar Belakang	12
	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	16
	Potensi dan Permasalahan Strategis	19
	Sistematika Pelaporan	21
02	PERJANJIAN KINERJA	
	Rencana Strategis	23
	Perjanjian Kinerja 2023	24
03	AKUNTABILITAS KINERJA	
	Capaian Kinerja Organisasi	26
	Realisasi Anggaran	57
04	PENUTUP	
	Penutup	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1.1 Wilayah Kerja berdasarkan Akses Transportasi	19
Tabel 1.2. Wilayah Kerja berdasarkan Tingkat Keamanan	19
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	24
Tabel 3.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	26
Tabel 3.2. Subservice (Pita Frekuensi Radio)	27
Tabel 3.3. Capaian IK-1 Monitoring SFR pada Kabupaten/Kota	28
Tabel 3.4. Capaian IK-1 Monitoring ISR dan 18 Pita Frekuensi Radio	28
Tabel 3.5. Capaian IK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio Microwavelink	34
Tabel 3.6. Capaian IK-2 Pengukuran Stasiun Radio FM Tahun 2023	37
Tabel 3.7. Hasil Lengkap Pengukuran Radio FM Tahun 2023	38
Tabel 3.8. Capaian IK-2 Pengukuran Televisi Siaran Digital Tahun 2023	39
Tabel 3.9. Hasil Lengkap Pengukuran Televisi Siaran Digital Tahun 2023	39
Tabel 3.10. Capaian IK-2 Kegiatan Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi	40
Tabel 3.11. Capaian Kegiatan Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi	40
Tabel 3.12. Hasil Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi Tahun 2023	42
Tabel 3.13. Capaian IK-3 Penanganan Aduan Gangguan SFR Tahun 2023	43
Tabel 3.14. Hasil Lengkap Penanganan Aduan Gangguan Tahun 2023	43
Tabel 3.15. Jadwal Pelaksanaan dan Objek Penertiban SFR Tahun 2023	44
Tabel 3.16. Capaian Penertiban Pelanggaran SFR Tahun 2023	45
Tabel 3.17. IK-4 Kondisi Perangkat SMFR Transportable Tahun 2023	48
Tabel 3.18. Capaian IK-5 Berfungsinya Perangkat Pendukung dan Alat Monitor Tahun 2023	49
Tabel 3.19. Capaian IK-6 Pelaksanaan UNAR Berbasis CAT Tahun 2023	51
Tabel 3.20. Rincian Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	52
Tabel 3.21 Capaian IK-7 Pendampingan Piutang SPP BHP Tahun 2023	52
Tabel 3.22 Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik Tahun 2023	53
Tabel 3.23 Capaian IK-8 Sosialisasi Pelayanan Publik Tahun 2023	53
Tabel 3.24 Pelaksanaan Bimtek SRC/LRC Tahun 2023	54
Tabel 3.25 Capaian IK-9 Bimtek SRC/LRC Tahun 2023	54
Tabel 3.26. Capaian IK-10 ISR Maritim Pada Tahun 2023	55
Tabel 3.27. Capaian IK-11 Verifikasi Data Koordinat ISR Pada Tahun 2023	56
Tabel 3.28. Tabel Alokasi Belanja Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana	57
Tabel 3.29. Tabel Alokasi Belanja Anggaran Berdasarkan Sumber Dana	57
Tabel 3.30. Tabel Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Tahun 2023	58
Tabel 3.31. Tabel Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tahun 2023	59
Tabel 3.32. Tabel Surat Masuk Keluar Pada Tahun 2023	59
Tabel 3.33. Neraca BMN Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura Tahun 2023	60
Tabel 3.34. Pengadaan Barang Tahun 2023	61
Tabel 3.35. Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2023	62

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Perbandingan Penggunaan SFR Berdasarkan Subservice	29
Grafik 3.2. Tingkat Kepatuhan Pengguna SFR	30
Grafik 3.3. Sebaran Target Pemeriksaan Stasiun Radio Microwavelink Kab/Kota Tahun 2023	32
Grafik 3.4. Sebaran Target Pemeriksaan Stasiun Radio Microwavelink Berdasarkan Operator	33
Grafik 3.5. Sebaran ISR Microwavelink berdasarkan Status di Lapangan	34
Grafik 3.6. Sebaran Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Operator	35
Grafik 3.7. Persentase ISR Broadcast Tahun 2023	37
Grafik 3.8. Hasil Ukur Stasiun Radio Siaran FM Tahun 2023	37
Grafik 3.9. Persentase Jumlah Hasil Penertiban Per Dinas Tahun 2023	44
Grafik 3.10. Persentase Jumlah Tindaklanjut Penertiban Tahun 2023	45
Grafik 3.11. Sebaran Perangkat SMFR Tahun 2023	46
Grafik 3.12. Kondisi Perangkat SMFR Tahun 2023	47
Grafik 3.13. Pelaksanaan Inspeksi Pemeliharaan SMFR Transportable	49
Grafik 3.14. Timeline Inspeksi Pemeliharaan SMFR Transportable	49
Grafik 3.15. Hasil Pelaksanaan UNAR Reguler dan Non Reguler Tahun 2023	50
Grafik 3.16. Hasil Pelaksanaan UNAR Berdasarkan Tingkatan Peserta	51
Grafik 3.17. Realisasi Pengurusan ISR Maritim Tahun 2023	55
Grafik 3.18. Pelaksanaan Verifikasi Koordinat ISR Microwavelink dan Broadcast	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<i>Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura</i>	14
<i>Gambar 3.1. Sebaran Target Remote Site Microwavelink Tahun 2023</i>	31
<i>Gambar 3.2. Sebaran Target Open Shelter Microwave link Tahun 2023</i>	32
<i>Gambar 3.3. Sebaran Radio FM di Kabupaten/Kota Tahun 2023</i>	36
<i>Gambar 3.4. Sebaran TV Digital di Kabupaten/Kota Tahun 2023</i>	36
<i>Gambar 3.5. Sebaran Lokasi Pelaksanaan Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi</i>	
<i>Gambar 3.6. Sebaran Perangkat SMFR di Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura</i>	48

01

PENDAHULUAN



- **Latar Belakang**
- **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
- **Potensi dan Permasalahan Strategis**
- **Sistematika Pelaporan**

LATAR BELAKANG

Pemerintah Pusat telah meluncurkan Buku Putih Strategi Nasional tentang potensi pertumbuhan ekonomi di era digital yang akan mencapai puncaknya di tahun 2030 ketika terjadi bonus demografi di Indonesia. Pengguna aktif internet di Indonesia saat ini tercatat mencapai 78% dari jumlah keseluruhan penduduk yang disebut sebagai salah satu pemicu pertumbuhan tersebut. Dengan pengguna internet yang sangat tinggi dan terus bertambah setiap tahunnya di Indonesia, akan mendorong peluang usaha terjadi di mana mana yang sejalan dengan munculnya lapangan pekerjaan baru. Serta ditambah dengan transformasi digital yang tidak hanya terjadi di sektor ekonomi, tetapi di semua lini kehidupan masyarakat.

Ada empat hal yang disebut sebagai indikator utama semua potensi di atas dapat tercapai. Yang pertama infrastruktur digital, kedua keterampilan digital, ketiga inovasi digital serta regulasi dan kebijakan pemerintah. Khusus indikator yang pertama, ini merupakan salah satu faktor kunci karena penting untuk memastikan keberlanjutan dan aksesibilitas infrastruktur digital termasuk penyediaan layanan internet yang cepat dan stabil dan merata di seluruh Tanah Air.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura sebagai salah satu unit pelaksana teknis di daerah dari Ditjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peranan yang cukup penting dalam mengawasi dan memastikan kebijakan pemerintah pusat dalam penyediaan infrastruktur spektrum frekuensi radio sebagai tulang punggung transformasi digital di Indonesia aman serta terkendali. Tidak hanya sampai disitu, pengawasan dan pengendalian juga dilakukan terhadap penyebaran alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan sebagai sarana. Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang sangat terbatas, sehingga dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara hati – hati, efektif dan efisien sehingga mendatangkan manfaat yang besar bagi Masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas yang cukup penting di atas, tentu diperlukan tahapan – tahapan yang telah dirumuskan dan disepakati bersama baik oleh Ditjen SDPPI sebagai instansi Pembina dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura sebagai pelaksana di lapangan.

Perencanaan, Penganggaran Kegiatan dan Pelaksanaa Kegiatan harus dilakukan secara konstruktif, sistematis, dan bisa dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan agar terwujudnya Akuntabilitas Pelaksanaan Pemerintahan yang terperinci sejak proses perencanaan hingga hasil akhir.

Akuntabilitas berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) diperlukan sebagai wadah untuk mengetahui serta mengukur sejauh mana hasil akhir dibandingkan dengan sasaran – sasaran Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Harapannya Pengawasan dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio di 24 Kabupaten/Kota di Papua berkontribusi aktif sebagai pendorong penguatan Pembangunan infrastruktur digital yang dapat dimanfaatkan sebagai stimulus dalam Pembangunan Ekonomi Digital serta meningkatkan daya saing global Indonesia.

GAMBARAN UMUM WILAYAH KERJA

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA

Di tahun 2023, Provinsi Papua telah dimekarkan menjadi 4 provinsi yaitu Provinsi Papua sendiri sebagai provinsi induk, lalu ditambah 3 provinsi baru yaitu Provinsi Papua Tengah dengan Ibu Kota di Nabire, Provinsi Papua Pegunungan dengan Ibu Kota di Wamena dan Provinsi Papua Selatan dengan Ibu Kota di Merauke.

Meski demikian, tidak ada perubahan jumlah wilayah kerja dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura yaitu 24 Kabupaten / Kota seperti beberapa tahun belakangan. Bedanya, saat ini 24 Kabupaten / Kota tersebut telah dibagi ke dalam 3 provinsi yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Namun secara garis besar, 24 Kabupaten / Kota ini terbagi ke dalam dua bagian besar karakteristik wilayah yaitu Wilayah Pesisir dan Wilayah Pegunungan.

Perbedaan karakteristik wilayah ini tentu memberikan pengaruh yang besar terhadap tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Kelas II Jayapura di masing – masing kabupaten / kota yang ada. Tantangan yang dihadapi antara lain meliputi jarak tempuh, akomodasi transportasi hingga masalah keamanan yang selalu dinamis di Tanah Papua.

Untuk jarak tempuh menuju ke 24 kabupaten / kota yang ada terdiri dari perjalanan darat, perjalanan udara, perjalanan laut dan kombinasi dari perjalanan darat, udara maupun laut. Selanjutnya untuk akomodasi transportasi, pelaksanaan tugas di kabupaten yang berada di wilayah pesisir memiliki sedikit kemudahan karena lebih banyak alternatif transportasi yang tersedia dibanding kabupaten – kabupaten yang berada di daerah pegunungan.

Selanjutnya untuk masalah keamanan, kabupaten – kabupaten di Wilayah Pegunungan menjadi daerah yang masuk dalam kategori rawan konflik sehingga dalam perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi untuk kabupaten – kabupaten tersebut harus didahului dengan mencari informasi terbaru kondisi keamanan agar meminimalisir hal – hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan tugas.



Sebaran Jumlah Kabupaten / Kota Wilayah Kerja di Tiga Provinsi



Provinsi Papua

9



Provinsi Papua
Pegunungan

7



Provinsi Papua
Tengah

8





Provinsi Papua

**Kota Jayapura
Kabupaten Jayapura
Kabupaten Keerom
Kabupaten Sarmi
Kabupaten Mamberamo Raya
Kabupaten Biak Numfor
Kabupaten Supiori
Kabupaten Kepulauan Yapen
Kabupaten Waropen
Kabupaten Nabire**



Provinsi Papua Tengah

**Kabupaten Nabire
Kabupaten Dogiyai
Kabupaten Deiyai
Kabupaten Paniai
Kabupaten Puncak Jaya
Kabupaten Puncak
Kabupaten Intan Jaya
Kabupaten Mimika**

Provinsi Papua
Provinsi Papua Pegunungan
Provinsi Papua Tengah



Provinsi Papua Pegunungan

**Kabupaten Jayawijaya
Kabupaten Mamberamo Tengah
Kabupaten Tolikara
Kabupaten Yalimo
Kabupaten Lanny Jaya
Kabupaten Nduga
Kabupaten Pegunungan Bintang**



TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 yang secara umum yaitu melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut bahwa UPT Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan secara teknis operasional dibina oleh Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Direktur Operasi Sumber Daya.

Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio terbagi ke dalam tiga kelas sebagai berikut :

1. **Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I**
2. **Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II**
3. **Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio**

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura menyelenggarakan fungsi:

- o Penyusunan rencana dan program;
- o Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- o Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- o Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- o Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- o Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- o Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- o Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- o Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura terdiri dari:

1. **Subbagian Umum**
mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan Masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.
2. **Tim Kerja Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Alat atau Perangkat Telekomunikasi**
mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.
3. **Tim Kerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat atau Perangkat Telekomunikasi**

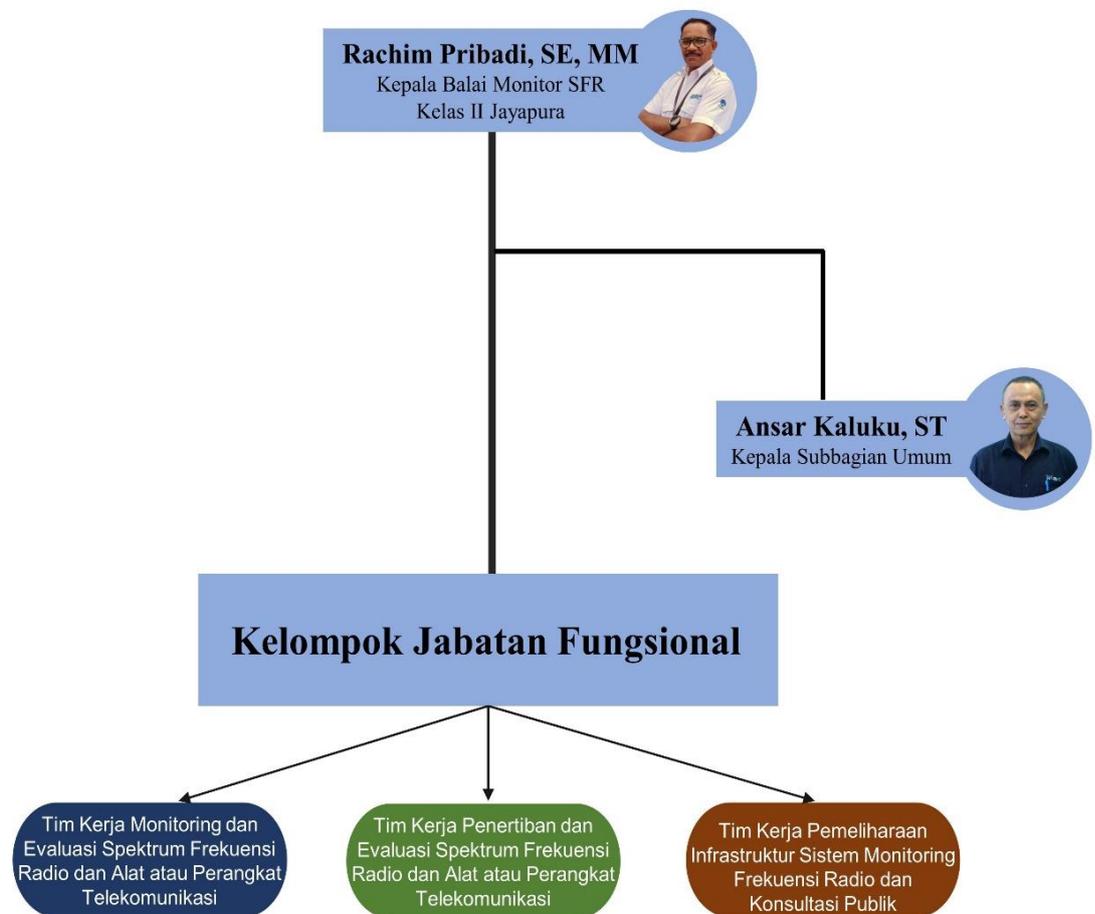
Mempunyai tugas melakukan penertiban, penyidikan terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika.

4. **Tim Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio dan Konsultasi Publik**

Mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

5. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang disesuaikan dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jabatan Fungsional di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura terbagi ke dalam 3 Tim Kerja yang telah disebutkan pada poin 2, 3 dan 4 di atas.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura

POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Provinsi Papua dimekarkan menjadi 4 provinsi pada tahun 2023 yang artinya percepatan pembangunan akan semakin gencar dilakukan oleh pemerintah. Sektor telekomunikasi tentu akan menjadi salah satu faktor penting pembangunan tersebut. Di Papua yang kondisi geografisnya masih sangat sulit dijangkau khususnya daerah pedalaman membutuhkan akseibilitas terhadap telekomunikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan spektrum frekuensi radio tidak luput dari tantangan tersebut, permasalahan yang kemudian muncul diantaranya:

1. Kondisi demografis Papua menjadi tantangan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, beberapa kabupaten hanya dapat dilalui dengan akses udara, kurangnya jalur darat membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Hanya 4 (empat) Kabupaten/Kota yang dapat dilalui oleh jalur darat dari Kota Jayapura selebihnya dilalui dengan jalur udara dan jalur laut. Berikut pembagian wilayah kerja berdasarkan akses transportasi:

No.	Akses Transportasi	Jumlah
1.	Transportasi Darat	4
2.	Transportasi Udara	10
3.	Transportasi Udara Laut	1
4.	Transportasi Udara Darat	9
JUMLAH		24

Tabel 1.1. Wilayah Kerja berdasarkan Akses Transportasi

2. Kondisi keamanan adalah hal yang sangat diperhatikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, untuk itu wilayah tugas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah menurut tingkat keamanannya yaitu wilayah kerja aman, wilayah kerja kurang aman, wilayah kerja tidak aman. Berikut pembagian wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura menurut tingkat keamanan:

No.	Akses Transportasi	Jumlah
1.	Aman	13
2.	Kurang Aman	8
3.	Tidak Aman	3
JUMLAH		24

Tabel 1.2. Wilayah Kerja berdasarkan Tingkat Keamanan

3. Terbatasnya jumlah pegawai fungsional pengendali frekuensi radio pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi harus dibantu oleh pegawai fungsional umum. Dimana dari 17 pegawai terdapat hanya 7 fungsional pengendali frekuensi selebihnya adalah pegawai dengan perjanjian kerja, fungsional umum dan pejabat struktural;

4. Masih terdapat penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR), sehingga perlu dilakukan kegiatan penertiban frekuensi radio dalam rangka menciptakan zona tertib frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura.

5. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan frekuensi radio serta alat / perangkat telekomunikasi, sehingga perlu secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi publik dengan tema – tema yang berkaitan dengan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat / perangkat telekomunikasi.

SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura Tahun 2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura Tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued), yang memuat:

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Potensi dan Permasalahan Strategis
- D. Sistematisasi Pelaporan

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini disajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, yang memuat:

- A. Rencana Strategis
- B. Penetapan / Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran serta kinerja lainnya, diuraikan sebagai berikut:

- A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
- B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- C. Kinerja Lainnya
Pada sub bab ini diuraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi (menyimpulkan bahwa kinerja utama maupun kinerja lainnya telah/belum berhasil/belum memenuhi target) serta menyajikan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

02

PERJANJIAN KINERJA



- **Rencana Strategis**
- **Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

RENCANA STRATEGIS

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas tetapi juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam peningkatan pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia.

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) merupakan salah satu Ditjen yang berada dibawah Kementerian Kominfo sesuai Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, memiliki tugas dan fungsi menciptakan terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informasi yang optimal dan mewujudkan industri komunikasi dan informasi yang berdaya saing dan ramah lingkungan melalui manajemen spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien, dinamis, dan optimal serta mendorong penggunaan teknologi yang inovatif yang memenuhi standar teknis.

Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut, Ditjen SDPPI memiliki misi pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Mewujudkan tatanan spektrum radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless broadband.
- Melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional, termasuk frekuensi dan slot orbit, mendorong kerjasama dengan industri satelit global dengan memperhatikan kepentingannasional.
- Mewujudkan pelayanan frekuensi dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat dan benar secara profesional dan berintegritas.
- Terkelolanya Penerimaan Negara Bukan Pajak dari izin yang diberikan kepada para pemangku kepentingan di bidang SDPPI.
- Mewujudkan standar perangkat informatika yang mendukung kemandirian teknologi dibidang wireless broadband.
- Mewujudkan kepastian hukum di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika.
- Mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi secara terpadu.
- Mengembangkan sistem stasiun monitoring frekuensi dan sistem monitoring perangkat yang terintegrasi secara nasional.
- Mewujudkan peningkatan kualitas layanan pengujian dan kalibrasi perangkat informatika yang profesional, berintegritas dan diakui dunia internasional.
- Mewujudkan dukungan teknis dan administratif yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen SDPPI.

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Pada Tahun 2023 Perjanjian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura mengalami perubahan pada pertengahan tahun. Perjanjian Kinerja dapat disajikan pada tabel 2.1. Sedangkan untuk mendukung kinerja tahun 2023, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura mengalokasikan dana pagu sebesar **Rp.17.764.980.000,-** (*Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) yang sebagian besar dananya bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	100%
		2. Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%
		3. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	99%
		4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat / Perangkat Telekomunikasi	93%
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT	95%
		6. Ujian Amatir Negara Amatir Radio Berbasis CAT	100%
		7. Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%
		8. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%
		9. Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%
		10. ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN	100%
		11. Verifikasi Data Koordinat Site ISR <i>Microwave Link</i> dan Penyiaran (<i>QR Code Site</i>)	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023	87
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

03

AKUNTABILITAS KINERJA



- **Capaian Kinerja Organisasi**
- **Realisasi Anggaran**

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi merupakan nilai keseluruhan capaian seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi atau pada perjanjian kinerja dengan mempertimbangkan bobot IKU dan bobot perspektif (pola Balance Scorecard). Pengukuran Capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura tahun 2023 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan capainnya dalam perjanjian kinerja antara Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Penetapan Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	100%
		2. Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%
		3. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	99%
		4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat / Perangkat Telekomunikasi	93%
		5. Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring / Ukur di UPT	95%
		6. Ujian Amatir Negara Amatir Radio Berbasis CAT	100%
		7. Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%
		8. Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%
		9. Bimbingan Teknis SRC/LRC	100%
		10. ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKLAN	100%
		11. Verifikasi Data Koordinat Site ISR <i>Microwave Link</i> dan Penyiaran (<i>QR Code Site</i>)	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2023	87
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80

Tabel 3.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Selanjutnya penjelasan detail Capaian Kinerja Organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura pada tahun 2023 dijelaskan pada Dua Bagian Besar Capaian Sasaran Kegiatan yaitu yang pertama **Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi** dan yang kedua **Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien**. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada masing-masing sasaran.

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, dan Penertiban Serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

1. IK-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio merupakan salah satu fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang dilaksanakan di seluruh wilayah kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Pada Gambaran Wilayah Kerja sebelumnya, ada total 24 Kabupaten/Kota yang tersebar ke dalam tiga provinsi yang menjadi wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura.

Pada tahun 2023, Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang ada di seluruh Indonesia ditargetkan melaksanakan monitoring terhadap 18 Pita Frekuensi Radio di 100% atau keseluruhan kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja. Hal ini sesuai dengan **Nota Dinas Direktur Pengendalian SDPPI Nomor: 64/DJ-SDPPI.4/PR.04.01/01/2023 tanggal 11 Januari 2023, Perihal Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian SDPPI Tahun 2023**. Terkait target ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura mendapatkan **pengecualian** untuk tiga Kabupaten/Kota yang masuk dalam kategori zona merah dari sisi keamanan yaitu Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak.

Monitoring Penggunaan SFR mempunyai 3 indikator kinerja yang harus dipenuhi yaitu :

- Jumlah Kabupaten/Kota termonitor sebanyak 100% dari keseluruhan wilayah kerja;
- Jumlah Izin Stasiun Radio (ISR) yang termonitor adalah sebesar **70%** dari target yang telah ditetapkan tiap Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja;
- Jumlah Pita Frekuensi Radio yang harus dimonitor yaitu sebanyak 18 Pita Frekuensi (Subservices) di tiap Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja. Pita Frekuensi Radio sebagaimana tabel di bawah;

No.	Subservice	Pita Frekuensi
1.	Maritim, Marabahaya	479 – 526.5 KHz
2.	Radio AM	535 – 1606 KHz
3.	Marabahaya	2173.5 – 2190.5 KHz
4.	Penerbangan HF, Amatir	5450 - 11400 KHz
5.	Maritim HF	26100 – 26175 KHz
6.	Radio FM	87.0 – 108 MHz
7.	Penerbangan VHF	108 – 137 MHz
8.	Komrad VHF, GRN, Maritim VHF	137 – 174 MHz
9.	Televisi VHF, DAB	174 – 230 MHz
10.	Tetap, Bergerak, Marabahaya	300 – 430 MHz
11.	Komrad UHF	430 – 460 MHz
12.	Tetap, Bergerak	460 – 470 MHz
13.	Televisi UHF, IMT	478 – 806 MHz
14.	Trunking, Downlink Seluler 800	806 – 880 MHz
15.	Downlink Seluler 900	925 – 960 MHz
16.	Downlink Seluler 1800	1805 – 1880 MHz
17.	Downlink Seluler 2100	2110-2170 MHz
18.	Seluler, Broadband 2.3 GHz	2300 – 2400 Mhz

Tabel 3.2. Subservice (Pita Frekuensi Radio)

Selanjutnya dalam melaksanakan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura mencapai hasil yang tertera pada tabel – tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target Jumlah Kab/Kota	Target Persentase (%)	Realisasi Jumlah Kab/Kota	Realisasi Persentase (%)
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten / Kota	21	100 %	21	100 %

Tabel 3.3 Capaian IK-1 Monitoring SFR pada Kabupaten/Kota

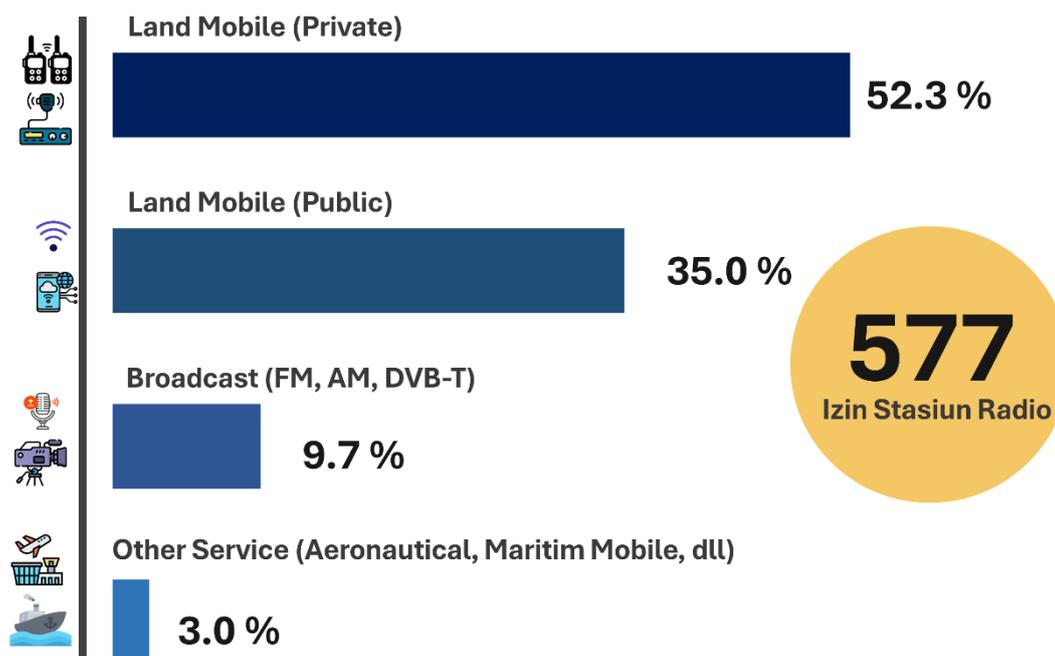
Dari Tabel 3.3 di atas, Capaian IK-1 Monitoring SFR pada Kabupaten/Kota menunjukkan jumlah wilayah kerja yang harus dimonitor sebanyak 21 Kabupaten/Kota setelah dikurangi 3 Kabupaten/Kota yang memiliki masalah keamanan. Dari target tersebut, keseluruhan 21 Kabupaten/Kota telah dimonitor terhadap 18 Pita Frekuensi Radio pada tahun 2023 sehingga target 100% Kabupaten/Kota termonitor berhasil terpenuhi. Selanjutnya untuk daftar Kabupaten/Kota yang berhasil dimonitor ditampilkan pada tabel 3.4 beserta Capaian Monitoring Izin Stasiun Radio (ISR) dan Monitoring 18 Pita Frekuensi Radio.

No	Nama Kabupaten/Kota	Target Monitoring ISR	Target Monitoring Pita Frekuensi (100%)	Realisasi Monitoring ISR (min 70%)	Persentase Realisasi Monitoring ISR	Realisasi Monitoring Pita Frekuensi
1	Kota Jayapura	87	18	82	94.3%	18
2	Kab. Jayapura	37	18	31	83.7%	18
3	Kab. Keerom	6	18	6	100%	18
4	Kab. Sarmi	9	18	8	88.8%	18
5	Kab. Mamberamo Raya	1	18	1	100%	18
6	Kab. Biak Numfor	28	18	26	92.8%	18
7	Kab. Supiori	3	18	3	100%	18
8	Kab. Kepulauan Yapen	12	18	10	91.6%	18
9	Kab. Waropen	2	18	2	100%	18
10	Kab. Nabire	25	18	23	92.0%	18
11	Kab. Dogiyai	0	18	0	100%	18
12	Kab. Deiyai	0	18	0	100%	18
13	Kab. Paniai	4	18	3	75%	18
14	Kab. Mimika	231	18	189	81.8%	18
15	Kab. Puncak Jaya	7	18	6	85.7%	18
16	Kab. Puncak	Kabupaten yang dikecualikan karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio				
17	Kab. Intan Jaya					
18	Kab. Nduga					
19	Kab. Jayawijaya	19	18	17	89.4%	18
20	Kab. Yalimo	1	18	1	100%	18
21	Kab. Mamberamo Tengah	1	18	1	100%	18
22	Kab. Tolikara	1	18	1	100%	18
23	Kab. Lanny Jaya	1	18	1	100%	18
24	Kab. Pegunungan Bintang	2	18	2	100%	18

Tabel 3.4 Capaian IK-1 Monitoring Izin Stasiun Radio dan 18 Pita Frekuensi Radio

Dari Tabel 3.4 tersebut dapat dilihat jumlah persentase Monitoring ISR dilaksanakan di 21 Kabupaten/Kota dengan capaian melampaui target sebesar 70% yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan jumlah 18 Pita Frekuensi Radio di masing – masing Kabupaten/Kota juga berhasil dimonitor sehingga telah sesuai dengan target sebesar 100% untuk Monitoring Pita Frekuensi Radio yang ada.

Dalam pelaksanaan monitoring frekuensi radio di tahun 2023, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura melakukan monitoring dan identifikasi pada 577 Izin Stasiun Radio yang ada di wilayah kerja. Persentase hasil monitoring berdasarkan Subservice tergambar pada grafik di bawah ini.

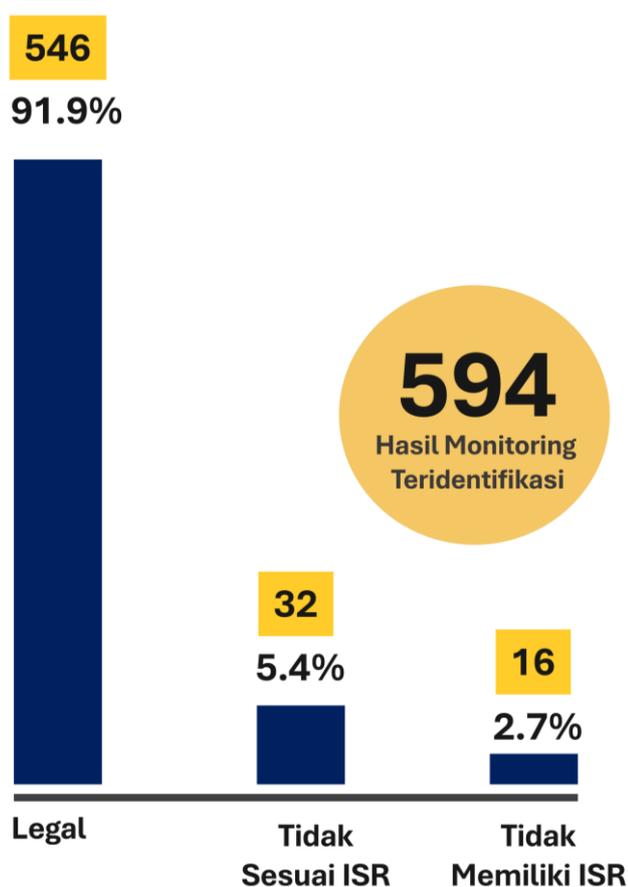


Grafik 3.1. Perbandingan Penggunaan SFR berdasarkan Subservice

Berdasarkan Grafik 3.1 di atas, dapat dilihat bahwa ISR yang termonitor lebih didominasi untuk layanan Land Mobile (Private) dengan total 52.3%, disusul Land Mobile (Public) sebesar 35.0% dan Broadcast sebesar 9.7%. Sisanya sebesar 3% diisi oleh layanan – layanan seperti Aeronautical, Maritim, dan lain – lain.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, Tingkat kepatuhan pengguna di lapangan merupakan cerminan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura. Pada Tahun 2023, dari keseluruhan 594 hasil monitoring yang teridentifikasi, selanjutnya dikelompokkan ke dalam tiga bagian besar, pertama Legal, yaitu pengguna frekuensi radio yang memiliki ISR dan menggunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, Tidak Sesuai ISR, yaitu pengguna frekuensi radio yang telah memiliki ISR, namun dalam penggunaannya tidak sesuai ISR dari sisi parameter teknis yang ada. Terakhir, Tidak Memiliki ISR, yaitu pengguna frekuensi radio yang tidak dilengkapi dengan ISR saat pelaksanaan monitoring di lapangan. Hasil Tingkat Kepatuhan Pengguna ISR ditampilkan pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.2. Tingkat Kepatuhan Pengguna SFR

Berdasarkan Grafik 3.2 di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura mencapai angka 91.9 % dengan total identifikasi 546 pengguna. Sedangkan sebanyak 5,4% atau 32 pengguna tidak menggunakan frekuensi radio sesuai ISR dan ada 16 pengguna yang saat dilakukan monitoring di lapangan, belum dilengkapi dengan ISR atau ilegal.

Kepada pengguna yang tidak memiliki ISR, dilakukan tindak lanjut dengan memberikan surat teguran agar segera melakukan pengurusan ISR sesuai mekanisme yang ada di pusat layanan perizinan Ditjen SDPPI. Sedangkan bagi pengguna yang tidak sesuai ISR, diberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis agar segera melakukan penyesuaian parameter teknis sesuai ISR yang dimiliki.

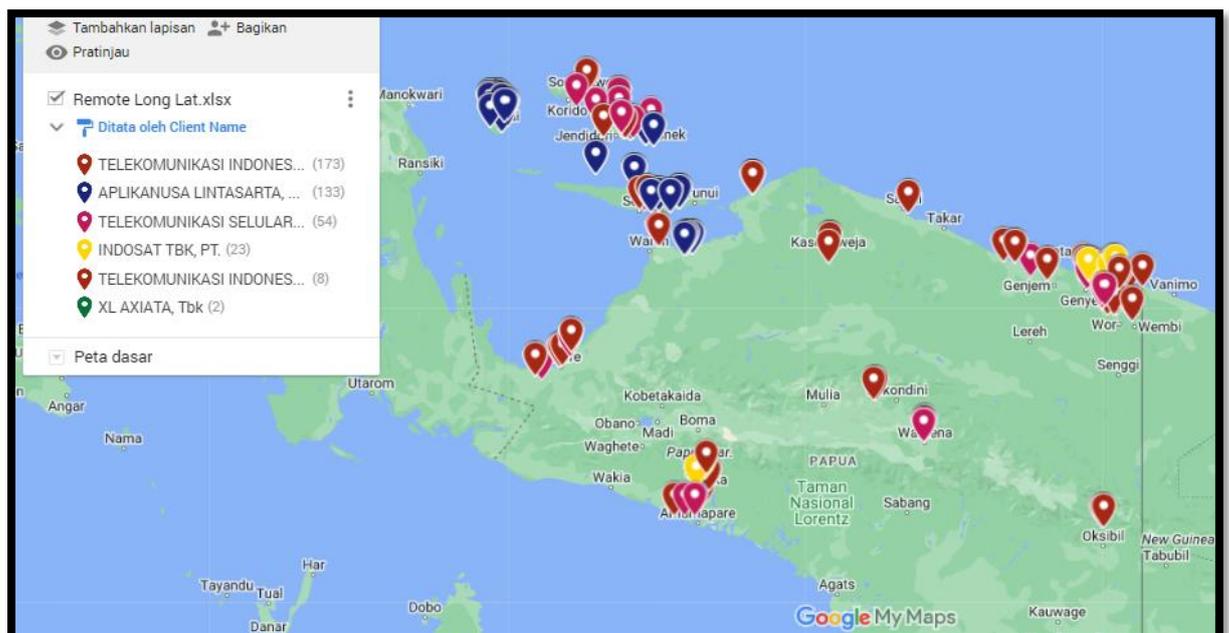
2. IK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

Indikator Kinerja yang kedua (IK-2) adalah Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) yang dibagi menjadi 3 kegiatan yaitu:

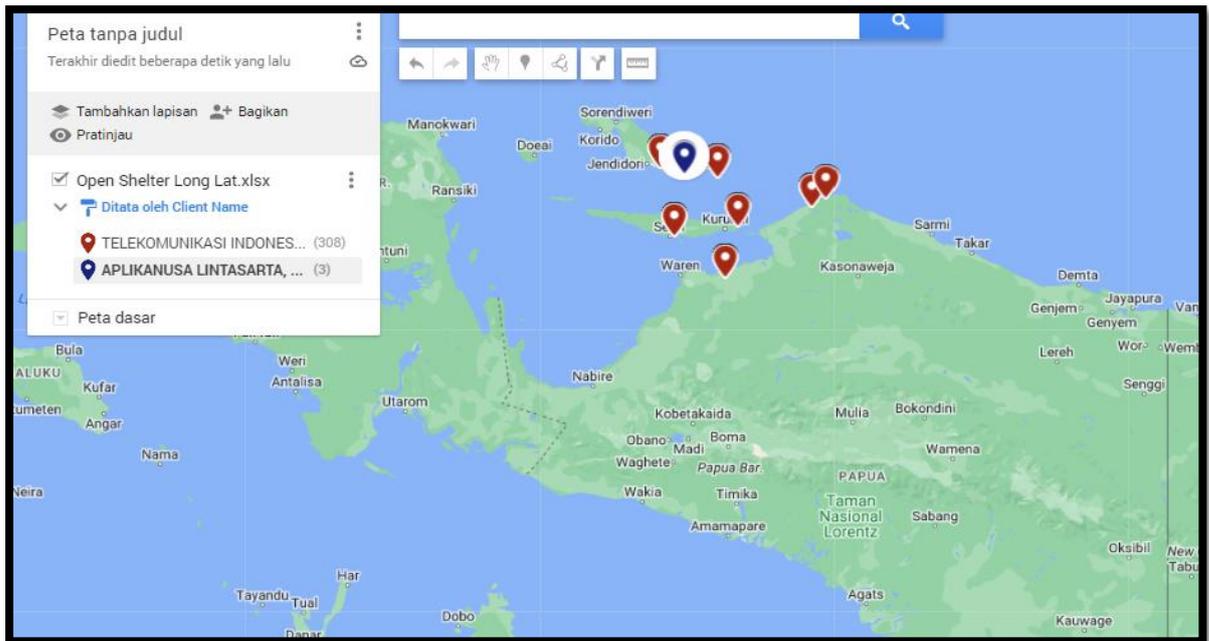
1. Pemeriksaan Microwave Link melalui Remote site akses NOC dan/atau NMS dan Inspeksi Open Shelter. Pemeriksaan Microwave Link memiliki target sebesar 100% diperiksa dari target yang telah ditetapkan;
2. Pengukuran Parameter Teknis Stasiun Radio FM dan Televisi Siaran Digital (DVB-T). Untuk Stasiun Radio FM, target pengukuran yang ditetapkan adalah sebanyak 50% dari total Radio FM yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR). Sedangkan untuk Televisi Siaran Digital (DVB-T), target pengukuran yang ditetapkan adalah 100% untuk semua ISR TV Digital di wilayah kerja;
3. Monitoring Alat dan atau Perangkat Telekomunikasi. Kegiatan ini memiliki target yaitu minimal 3 perangkat dari sampling yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sekarang – kurangnya sebanyak 7 kali kegiatan selama satu tahun.

Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio yang Pertama yaitu Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link menggunakan metode *Remote Site* dan *Open Shelter*. Jumlah ISR *microwave link* wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura yang menjadi target *remote site* adalah sebanyak 393 ISR, sedangkan untuk *open shelter* adalah sebanyak 311 ISR. Ada 5 Operator yang menjadi target pemeriksaan stasiun radio microwavelink pada tahun 2023 yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL), PT. Indosat Tbk, PT. XL Axiata Tbk dan PT. Aplikasi Lintasarta.

Berikut gambaran umum sebaran target Remote Site dan Open Shelter di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura pada Tahun 2023.

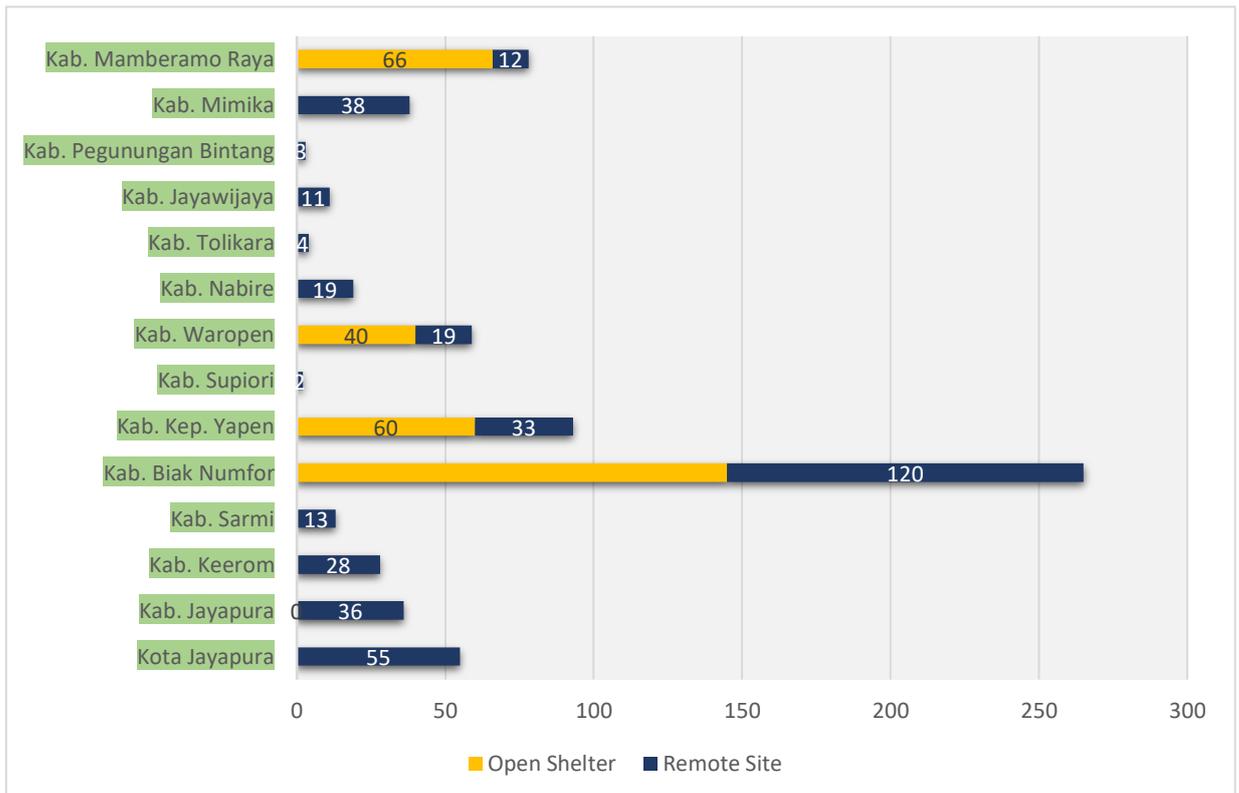


Gambar 3.1. Sebaran Target Remote Site Microwave link Tahun 2023



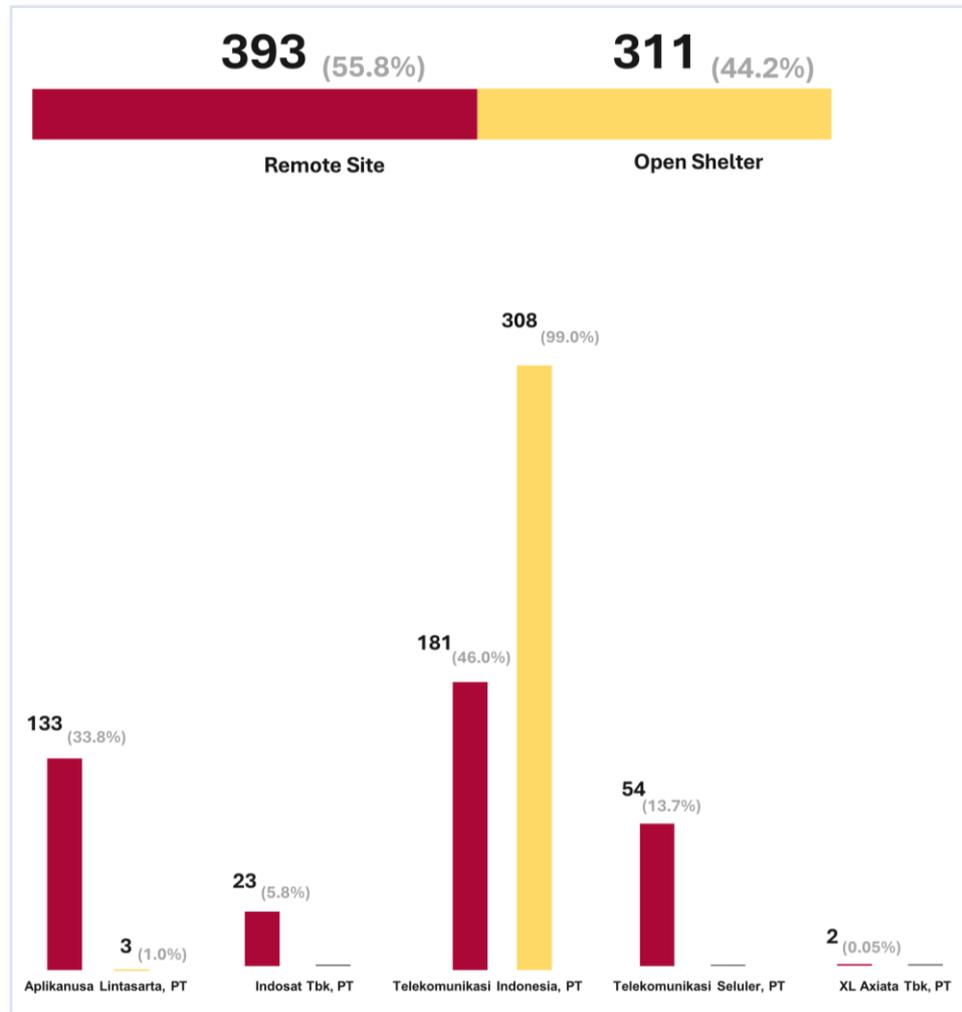
Gambar 3.2. Sebaran Target Open Shelter Microwave link Tahun 2023

Sebaran Target Remote Site dan Open Shelter di tiap kabupaten/kota juga dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.3. Sebaran Target Pemeriksaan Stasiun Radio Microwavelink Kab/Kota Tahun 2023

Apabila dilihat berdasarkan grafik 3.3, sebaran target untuk Remote Site berada di 14 Kabupaten/Kota sedangkan sebaran target untuk Open Shelter hanya berada di 4 Kabupaten/Kota. Selanjutnya sebaran target pemeriksaan stasiun radio microwavelink berdasarkan operator pengguna frekuensi radio dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.4. Sebaran Target Pemeriksaan Stasiun Radio Microwavelink per Operator

Dari grafik 3.4 di atas, total keseluruhan target yang diperiksa yaitu sebanyak 704 ISR. Untuk target remote site lebih banyak didominasi oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Aplikanusa Lintasarta, dan PT. Telekomunikasi Seluler. Sebaran sisanya yaitu PT. Indosat Tbk dan PT. XL Axiata. Sedangkan untuk target Open Shelter hanya didominasi oleh PT. Telekomunikasi Indonesia oleh karena Sebagian besar perangkat Operator tersebut tidak bisa dilakukan pemeriksaan menggunakan metode remote site sehingga diperlukan petugas untuk datang langsung ke site yang ada.

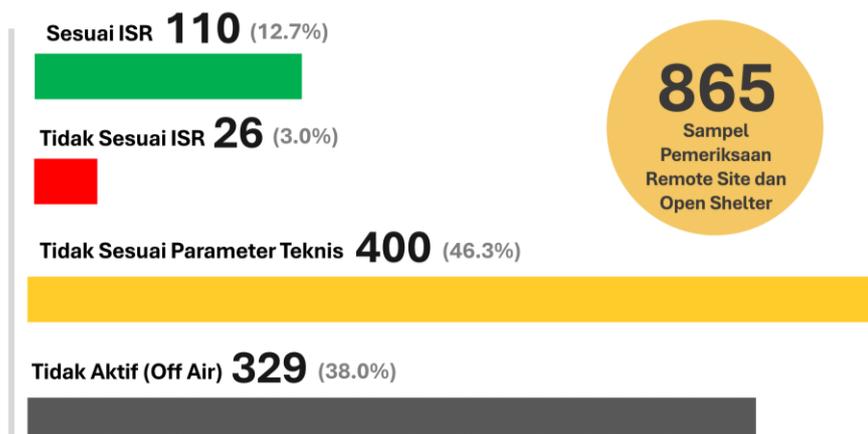
Setelah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan stasiun radio microwavelink di sepanjang tahun 2023, didapatkan capaian pada tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	Target ISR Diperiksa	Target Persentase (%)	Realisasi ISR Diperiksa	Realisasi Persentase (%)
Pemeriksaan Stasiun Radio Microwavelink Remote Site	393	100%	395	100%
Pemeriksaan Stasiun Radio Microwavelink Open Shelter	311	100%	470	100%

Tabel 3.5 Capaian IK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio Microwavelink

Jika melihat tabel tersebut, capaian pemeriksaan stasiun radio microwavelink untuk metode Remote Site dan Open Shelter telah mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan. Pada jumlah realisasi pemeriksaan metode open shelter didapati lebih banyak dibanding target yang telah ditetapkan disebabkan hasil pemeriksaan pada metode remote site yang diidentifikasi bermasalah, dilakukan tindak lanjut dengan kegiatan open shelter, sehingga secara realisasi melebihi target open shelter yang sesungguhnya. Begitu juga dengan target Remote Site ada tambahan 2 ISR diperiksa karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pemeriksaan dengan metode Open Shelter, namun saat akan dilakukan pemeriksaan Remote Site, konektivitas menuju kedua Site tersebut terputus.

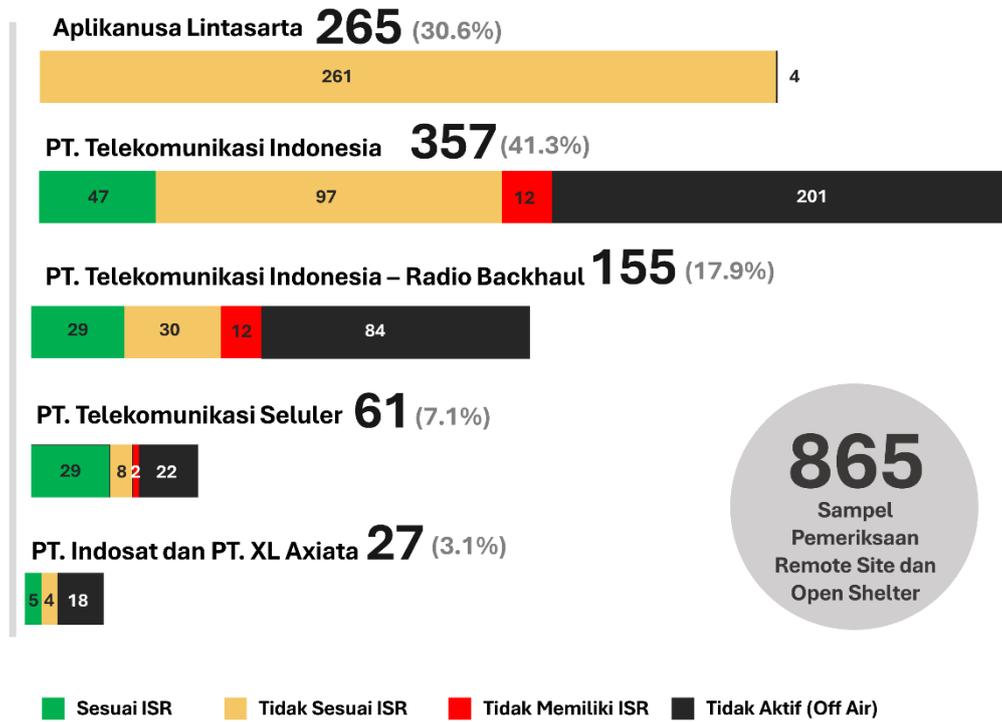
Untuk hasil pemeriksaan terhadap stasiun microwavelink melalui metode Remote Site dan Open Shelter dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.5. Sebaran ISR Microwavelink berdasarkan status di lapangan

Berdasarkan data temuan di lapangan, untuk Stasiun Radio Microwavelink yang Tidak Sesuai Parameter Teknis lebih didominasi karena koordinat di lapangan tidak sesuai dengan yang ada di dalam dokumen ISR. Sedangkan ISR yang ditemukan dalam keadaan Tidak Aktif (Off Air) dikarenakan beberapa kondisi seperti perangkat rusak dan perangkat sudah tidak digunakan karena telah beralih menggunakan jaringan fiber optik.

Hasil pemeriksaan detail per masing – masing operator yang masuk dalam target Pemeriksaan Stasiun Radio Microwavelink secara keseluruhan juga dapat dilihat pada grafik masing – masing operator di bawah ini.



Grafik 3.6. Sebaran Hasil Pemeriksaan berdasarkan Operator

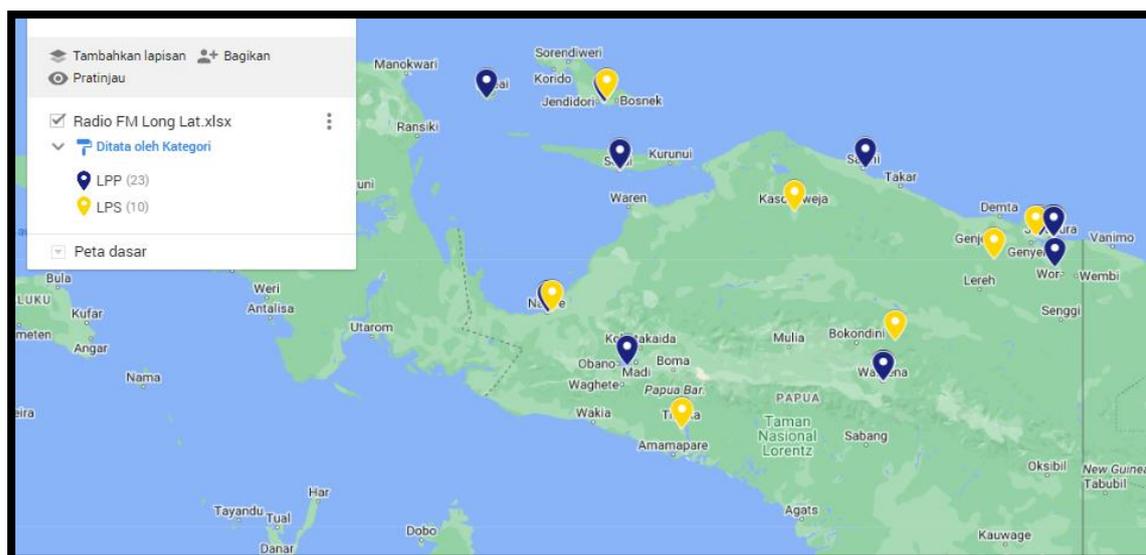
Selanjutnya terhadap temuan hasil dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- Stasiun radio yang belum memiliki ISR, diberikan surat peringatan kepada penggunanya untuk tidak dilengkapi ISR dan diberikan waktu paling lama 7 hari kerja untuk mengajukan permohonan ISR sejak Berita Acara Hasil Inspeksi ditandatangani.
- Stasiun Radio yang ditemukanali Tidak Sesuai ISR, diberikan surat peringatan kepada penggunanya untuk mengajukan Surat Permohonan Perubahan Data ISR kepada Direktur Operasi Sumber Daya atau melakukan perubahan parameter teknis sesuai ISR paling lama 7 hari kerja sejak Berita Acara Hasil Inspeksi ditandatangani.
- Stasiun Radio yang ditemukanali dalam keadaan Tidak Aktif (Off Air), diberikan surat peringatan kepada penggunanya agar mengajukan Surat Permohonan Penghentian Masa Laku ISR kepada Direktur Operasi Sumber Daya paling lama 7 hari kerja sejak Berita Acara Hasil Inspeksi ditandatangani.

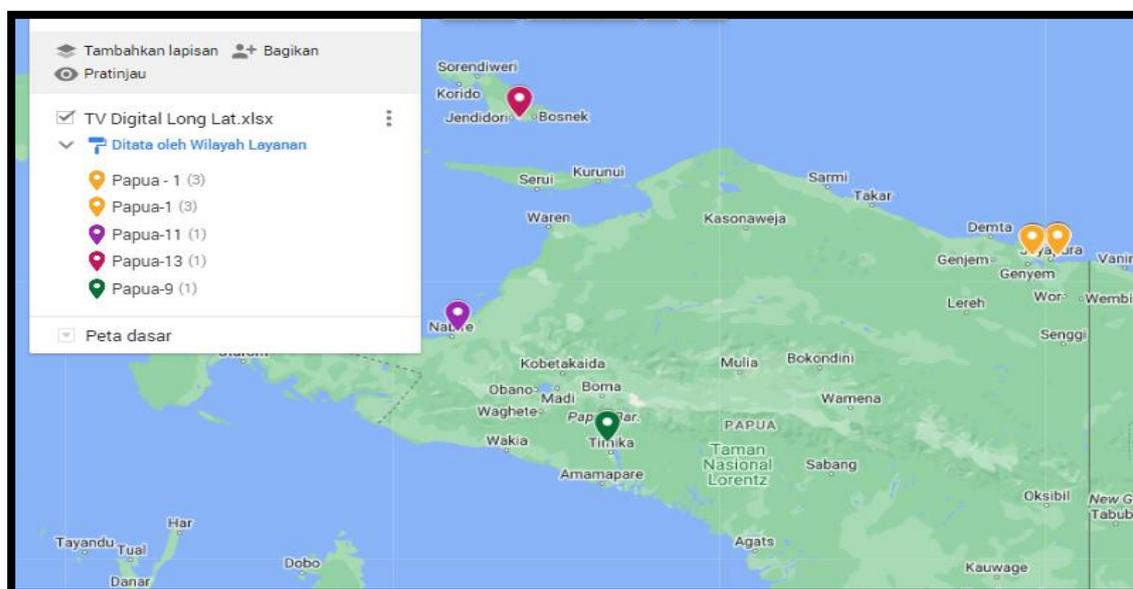
Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio yang Kedua yaitu Pengukuran Parameter Teknis Stasiun Radio FM dan Televisi Siaran Digital (DVB-T) untuk mengetahui kesesuaian penggunaan frekuensi radio di lapangan dengan data parameter teknis yang ada di dokumen Izin Stasiun Radio (ISR) dari pengguna. Kegiatan pengukuran Parameter Teknis bertujuan agar menciptakan wilayah tertib penggunaan Spektrum Frekuensi Radio agar meminimalisir potensi terjadinya gangguan (*interference*) frekuensi radio.

Pada tahun 2023, jumlah ISR Radio FM berjumlah 33 ISR yang terbagi ke dalam dua bagian besar yaitu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Swasta. Sedangkan ISR Televisi Digital (DVB-T) berjumlah 9 ISR. Dengan demikian total ISR Broadcast berjumlah 42 yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota

Berikut gambaran umum sebara Radio FM dan TV Digital (DVB-T) di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura pada Tahun 2023

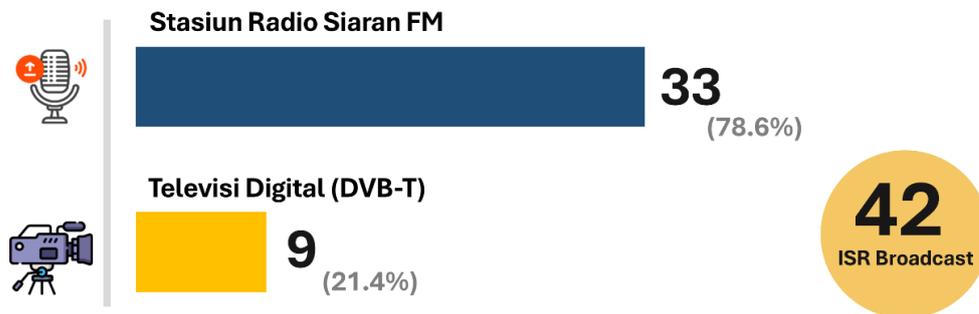


Gambar 3.3. Sebaran Radio FM di Kabupaten/Kota Tahun 2023



Gambar 3.4. Sebaran TV Digital di Kabupaten/Kota Tahun 2023

Selanjutnya perbandingan persentase ISR Radio FM dan Televisi Siaran Digital (DVB-T) dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 3.7. Persentase ISR Broadcast Tahun 2023

Dalam pelaksanaan Pengukuran Parameter Teknis Radio Siaran FM pada tahun 2023, dari target 50% atau sekurang – kurangnya 17 Radio Siaran FM yang harus diukur, setelah menyelesaikan kegiatan Pengukuran, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura mendapatkan capaian 28 ISR Radio Siaran FM yang diukur atau secara persentase sebesar 84.4%.

Indikator Kinerja	Target ISR Terukur	Target Persentase (%)	Realisasi ISR Terukur	Realisasi Persentase (%)
Pengukuran Stasiun Radio Siaran FM	17	50%	28	84.4 %

Tabel 3.6 Capaian IK-2 Pengukuran Stasiun Radio Siaran FM Tahun 2023

Meskipun mencapai target yang telah ditetapkan, beberapa Radio Siaran FM yang tidak berhasil diukur disebabkan karena sejumlah kondisi seperti Radio sudah/sementara berstatus Off Air dan kendala akses ke lokasi pengukuran yang tidak memungkinkan. Ringkasan hasil ukur terhadap 28 Radio FM dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.8. Hasil Ukur Stasiun Radio Siaran FM Tahun 2023

Hasil lengkap pengukuran Stasiun Radio FM dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk Stasiun Radio yang diberi arsiran berwarna coklat adalah Stasiun Radio yang tidak diukur.

No.	Nama Stasiun Radio	Nama Udara	Frek. (Mhz)	Wilayah	Keterangan
1.	LPP RRI	LPP RRI Jayapura	1.053	Kota Jayapura	OFF AIR
2.	PT. Radio Rajawali Mimika	Rajawali FM	87.8	Mimika	Sesuai ISR
3.	Radio Suara DC4	Radio DC4 FM	88.5	Kota Jayapura	Sesuai ISR
4.	LPP RRI	LPP RRI Wamena	88.8	Jayawijaya	Sesuai ISR
5.	LPP RRI	RRI Skouw	89	Keerom	Sesuai ISR
6.	PT. Radio Swara Grasia	RADIO Swara Grasia	89.6	Jayawijaya	Sesuai ISR
7.	LPP RRI	LPP RRI Jayapura	90.1	Kota Jayapura	Sesuai ISR
8.	LPP RRI	LPP RRI Nabire	90.1	Nabire	Sesuai ISR
9.	PT. Radio Suara Kemenangan	Kasona FM	90.9	Mamberamo Raya	OFF AIR
10.	PT. Radio Bahana Sangkakala.	Radio Bahana Sangkakala	92.5	Kota Jayapura	Sesuai ISR
11.	LPP RRI	LPP RRI Sentani	93.3	Jayapura	Tidak Sesuai (on di 93.5)
12.	LPP RRI	LPP RRI Nabire	94.4	Nabire	Sesuai ISR
13.	LPP RRI	LPP RRI Biak Numfor	94.5	Biak Numfor	Sesuai ISR
14.	LPP RRI	LPP RRI Serui	94.8	Kepulauan Yapen	Sesuai ISR
15.	LPP RRI	LPP RRI Biak Numfor	95.3	Biak Numfor	Sesuai ISR
16.	LPP RRI	LPP RRI Jayapura	96	Kota Jayapura	Sesuai ISR
17.	LPP RRI	LPP RRI Biak Numfor	96.1	Biak Numfor	Sesuai ISR
18.	PT. Anugrah Rahmat Ilahi.	Sobat FM	96.3	Jayapura	Sesuai ISR
19.	LPP RRI	LPP RRI Wamena	96.3	Jayawijaya	Sesuai ISR
20.	LPP RRI	LPP RRI Serui	96.4	Kepulauan Yapen	Sesuai ISR
21.	LPP RRI	LPP RRI Paniai	96.5	Paniai	OFF AIR
22.	LPP RRI	LPP RRI Sarmi	96.5	Sarmi	OFF AIR
23.	LPP RRI	LPP RRI Nabire	96.8	Nabire	Sesuai ISR
24.	LPP RRI	RRI Wamena	97.1	Jayawijaya	Sesuai ISR
25.	LPP RRI	LPP RRI Jayapura	97.6	Kota Jayapura	Sesuai ISR
26.	LPP RRI	LPP RRI Nabire	97.6	Nabire	Sesuai ISR
27.	PT. Radio Suara Rei Nazaret.	Bogo FM	98	Mamberamo Tengah	Kendala Akses Lokasi
28.	PT. Suara Tabi Jayapura	Tabi FM	100	Jayapura	Sesuai ISR
29.	Radio Swara Gita Sangkakala, PT.	Radio Swameka FM	101.1	Nabire	Sesuai ISR
30.	LPP RRI	RRI Serui	101.5	Kepulauan Yapen	Sesuai ISR
31.	PT. Radio Swara Kasih Anugrah	Radio Swara Kasih Anugrah	103	Jayawijaya	Sesuai ISR
32.	LPP RRI	LPP RRI Jayapura	105.9	Kota Jayapura	Sesuai ISR
33.	Perkumpulan Suara Kasih Oikumene Biak	Radio Suara Kasih Oikumene	107.7	Biak Numfor	Sesuai ISR

Tabel 3.7 Hasil Lengkap Pengukuran Stasiun Radio FM Tahun 2023

Selanjutnya terhadap temuan hasil dalam kegiatan pengukuran parameter radio FM tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah melakukan tindak lanjut dengan mengirimkan surat peringatan kepada Radio FM yang ditemukanali Tidak Sesuai ISR agar segera melakukan setting parameter teknis sesuai dengan dokumen Izin Stasiun Radio (ISR) yang dimiliki pengguna.

Selain Radio FM, juga dilakukan Pengukuran Parameter Teknis terhadap penyelenggara MUX Televisi Siaran Digital (DVB-T). Pada tahun 2023 ada 9 ISR yang diukur dan tersebar di 4 wilayah layanan yang ada di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura. Hasil ukur TV Siaran Digital dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	Target ISR Terukur	Target Persentase (%)	Realisasi ISR Terukur	Realisasi Persentase (%)
Pengukuran Televisi Digital (DVB-T)	9	100%	9	100 %

Tabel 3.8 Capaian IK-2 Pengukuran Televisi Siaran Digital Tahun 2023

Dari tabel 3.8 di atas, dapat dilihat realisasi hasil ukur terhadap target yang ditetapkan yaitu 100% ISR Televisi Siaran Digital berhasil diukur sehingga secara keseluruhan memenuhi target yang ada. Hasil lengkap pengukuran Televisi Siaran Digital (DVB-T) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Penyelenggara MUX	Kanal	Frek. (Mhz)	Wilayah Layanan	Keterangan
1.	PT. Duta Visual Nusantara TV Tujuh	34	578	Papua - 1	Sesuai ISR
2.	PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia	37	602	Papua - 1	Sesuai ISR
3.	LPP TVRI	43	650	Papua - 1	Sesuai ISR
4.	PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh	34	578	Papua-1	Sesuai ISR
5	LPP TVRI	28	530	Papua-11	Sesuai ISR
6	LPP TVRI	30	546	Papua-9	Sesuai ISR
7	PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia	37	602	Papua-1	Sesuai ISR
8	LPP TVRI	43	650	Papua-1	Sesuai ISR
9	LPP TVRI	29	538	Papua-13	Sesuai ISR

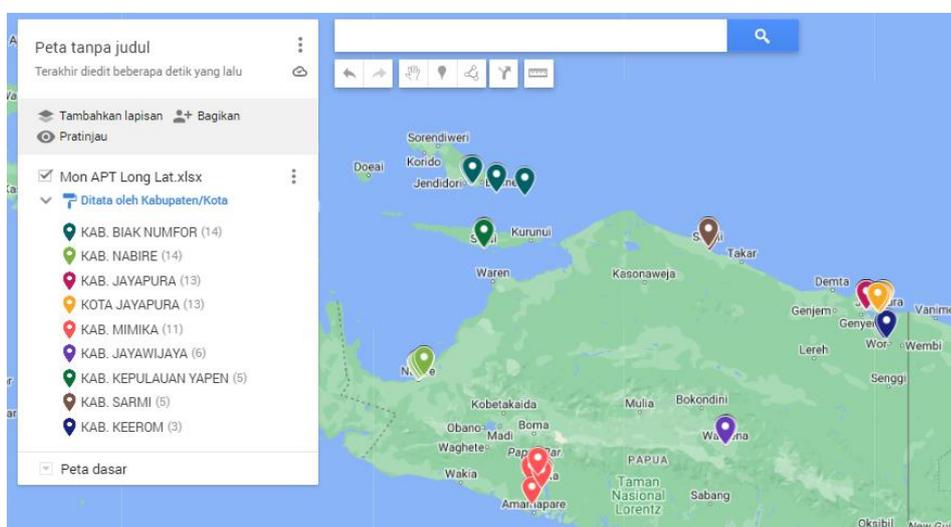
Tabel 3.9 Hasil Lengkap Pengukuran Televisi Siaran Digital (DVB-T) Tahun 2023

Kegiatan Pemeriksaan Stasiun Radio yang Ketiga yaitu monitoring alat dan atau perangkat telekomunikasi yang ada di masyarakat. Untuk mencapai indikator ini, diwajibkan melakukan monitoring terhadap minimal 3 alat/perangkat telekomunikasi di Kabupaten/Kota wilayah kerja. Di sepanjang tahun 2023, target pelaksanaan monitoring alat/perangkat telekomunikasi yaitu minimal 7 kali kegiatan.

Indikator Kinerja	Target Jumlah Kegiatan	Target Persentase (%)	Realisasi Jumlah Kegiatan	Realisasi Persentase (%)
Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi	7	100%	10	143%

Tabel 3.10 Capaian IK-2 Capaian Kegiatan Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi

Dari tabel 3.10 di atas, dapat dilihat bahwa capaian pelaksanaan kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi yaitu sebanyak 10 kegiatan melebihi target yang ditetapkan yaitu 7 kali kegiatan. Untuk sebaran Kabupaten/Kota lokasi pelaksanaan kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi di tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.5. Sebaran Lokasi Pelaksanaan Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi

Selanjutnya untuk total capaian monitor alat/perangkat telekomunikasi, telah dilaksanakan monitor terhadap sejumlah alat/perangkat telekomunikasi yang berada di Masyarakat yaitu sebanyak 84 sampel yang akan diperiksa secara lengkap untuk mengecek Sertifikasi dan QR Code / Label.

Indikator Kinerja	Perangkat yang diperiksa	Perangkat Tanpa Sertifikat	Perangkat Tanpa QR Code / Label	Tingkat Kepatuhan
Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi	84	0	0	100%

Tabel 3.11 Capaian kegiatan Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi

Hasil lengkap pengukuran monitoring alat/perangkat telekomunikasi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO	NAMA PERANGKAT	MERK	PENGGUNA	KAB/KOTA	SERTIFIKAT (ADA/TIDAK)
1	Handy Talky	Weierwei	PT. Gapura Angkasa	KAB. JAYAPURA	Ada
2	Radio Handy Talky (HT)	WEIRCOM	PT. Gapura Angkasa	KAB. JAYAPURA	Ada
3	Handy Talky	Baofeng	CV. Multi Bangunan Cabang Sentani	KAB. JAYAPURA	Ada
4	HF Radio Communication	Codan	Yayasan Jasa Aviiasi Indonesia (YAJASI)	KAB. JAYAPURA	Ada
5	Two Way Radio	Baofeng	Yayasan Jasa Aviiasi Indonesia (YAJASI)	KAB. JAYAPURA	Ada
6	Mobile Radio / Two Way Radio	Motorola	PT. PLN (Persero) ULP Sentani	KAB. JAYAPURA	Ada
7	Portable Radio	Motorola	PT. PLN (Persero) ULP Sentani	KAB. JAYAPURA	Ada
8	Portable Radio	Motorola	PT. Pertamina (Persero) DPPU Sentani	KAB. JAYAPURA	Ada
9	Radio Komunikasi 2 Arah	ALINCO	PT. Trigana Air Service	KAB. JAYAPURA	Ada
10	Handy Talky	Baofeng	PT. Trigana Air Service	KAB. JAYAPURA	Ada
11	Radio Komunikasi 2 Arah	ALINCO	PT. Prathita TitianNusantara	KAB. JAYAPURA	Ada
12	Portable Radio	Motorola	PT. Prathita TitianNusantara	KAB. JAYAPURA	Ada
13	Portable Radio	Motorola	PT. Lion Mentari Airlines (Lion Air)	KAB. JAYAPURA	Ada
14	SET TOP BOX DVB-S2	K-VISION	Penginapan Sumber Rejeki	KAB. SARMI	Ada
15	Tactical Handled	Hytera	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas)	KAB. SARMI	Ada
16	HF Radio Communications	CODAN	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas)	KAB. SARMI	Ada
17	Two Way Radio	ICOM	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas)	KAB. SARMI	Ada
18	Two Way Radio	ICOM	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas)	KAB. SARMI	Ada
19	Two Way Radio	ICOM	Dinas Kominfo Kab. Keerom	KAB. KEEROM	Ada
20	Radio Portable	Hytera	Lapas Perempuan Kelas III Jayapura (Kab. Keerom)	KAB. KEEROM	Ada
21	3G/4G Wireless N Router	TP-LINK	DNH COM A	KAB. KEEROM	Ada
22	Radio Portable	Hytera	DIREKTORAK JENDERAL PEMASYARAKATAN	KAB. KEPULAUAN YAPEN	Ada
23	VHF MARINE TRANSCEIVER	ICOM	PT Pertamina (Persero)	KAB. KEPULAUAN YAPEN	Ada
24	SSB RADIO TELEPHONE	ICOM	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	KAB. KEPULAUAN YAPEN	Ada
25	Portable Radio	Motorola	PLN (PERSERO) PT	KAB. KEPULAUAN YAPEN	Ada
26	Portable Radio	Motorola	PT Pertamina (Persero)	KAB. KEPULAUAN YAPEN	Ada
27	Two Way Radio	Baofeng	PT Alfa Cahaya Lany	KOTA JAYAPURA	Ada
28	FM TRANSCEIVER	ICOM	Balmon SFR Kelas II Jayapura	KOTA JAYAPURA	Ada
29	GPON ONU	FiberHome	Balmon SFR Kelas II Jayapura	KOTA JAYAPURA	Ada
30	TWO-WAY RADIO	SKY-MAX	PT. Harum Sari Papua	KOTA JAYAPURA	Ada
31	Two Way Radio	ICOM	PT Hastian Berkat Anugrah	KOTA JAYAPURA	Ada
32	Portable Two Way Radio	SME-com	PT. Papua Pasifik Permai	KOTA JAYAPURA	Ada
33	Portable Radio	Motorola	PT Cahaya Mitra Hospitalitad	KOTA JAYAPURA	Ada
34	Two Way Radio	ICOM	PT Sagita Hotelindo Papua	KOTA JAYAPURA	Ada
35	Handy Talky	BRUNO	PT Sahid Papua	KOTA JAYAPURA	Ada
36	Portable Radio	Motorola	Numbay Hospitalitas, PT	KOTA JAYAPURA	Ada
37	handy talky	CLARIGO	CV. Multi Bangunan	KOTA JAYAPURA	Ada
38	VHF/UHF FM DUAL BAND HANDHELD TRANSCEIVER	LUPAX	PT Riandita Karya Sanbay	KOTA JAYAPURA	Ada
39	Two Way Radio	ICOM	Yayasan Dian Harapan Papua	KOTA JAYAPURA	Ada
40	PEMANCAR TELEVISI SIARAN	PLISCH	LPP TVRI BIAK	KAB. BIAK NUMFOR	Ada

41	Pemancar FM	TRANSCAST	GIANT COMMUNICATION,PT.	KAB. BIAK NUMFOR	Ada
42	Transmitter Radio FM	NAUTEL	GIANT COMMUNICATION,PT.	KAB. BIAK NUMFOR	Ada
43	HF-SSB Mobile/Fixed	motorola	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas)	KAB. BIAK NUMFOR	Ada
44	VHF Mobile/Fixed Transceiver	Icom	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas)	KAB. BIAK NUMFOR	Ada
45	Portable Radio	Motorola	PT Pertamina (Persero)Biak/DPPU	KAB. BIAK NUMFOR	Ada
46	Portable Radio	Motorola	PT Pertamina (Persero) Biak	KAB. BIAK NUMFOR	Ada
47	Portable Radio	Motorola	PT PLN (Persero) Biak	KAB. BIAK NUMFOR	Ada
48	Pemancar FM	RVR	Radio Swara Kasih Oikumene Biak	KAB. BIAK NUMFOR	Ada
49	PORTABLE RADIO	MOTOROLA	Direktorat Jenderal Pemasarakatan Biak	KAB. BIAK NUMFOR	Ada
50	Two Way Radio	Firstcom	CV. Maju Makmur	KAB. BIAK NUMFOR	Ada
51	Portable Radio	Motorola	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	KAB. JAYAWIJAYA	Ada
52	TWO WAY RADIO	ICOM	Budi Jaya, CV	KAB. JAYAWIJAYA	Ada
53	Mobile Radio	MOTOROLA	PT PLN (Persero)	KAB. JAYAWIJAYA	Ada
54	Portable Radio	Motorola	PT PLN (Persero)	KAB. JAYAWIJAYA	Ada
55	Portable Radio	Motorola	PT PLN (Persero)	KAB. MIMIKA	Ada
56	Transmitter Radio FM	NAUTEL	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	KAB. JAYAWIJAYA	Ada
57	Pemancar STL Radio Siaran	KWL Broadcast	Radio Swara Kasih Papua, PT	KAB. JAYAWIJAYA	Ada
58	Radio Portable	Hytera	Lembaga Permasarakatan Kelas II B Timika	KAB. MIMIKA	Ada
59	Portable Radio	Motorola	PT PLN (Persero)	KAB. MIMIKA	Ada
60	Handy Talkie	SPC	Grand Tembaga Hotel Timika-Pqpua, PT	KAB. MIMIKA	Ada
61	Transmitter FM Radio	BW Broadcast	PT Radio Rajawali Mimika	KAB. MIMIKA	Ada
62	Radio Komunikasi Dua Arah	Motorola	PT Aditama Graha Persada	KAB. MIMIKA	Ada
63	HF ALL BAND TRANSCEIVER (IC- 718)	ICOM	Dinas Kesehatan Kab. Mimika	KAB. MIMIKA	Ada
64	Digital Repeater	Hytera	PT PLN (Persero)	KAB. MIMIKA	Ada
65	Portable Radio	Motorola	PT PLN (Persero)	KAB. MIMIKA	Ada
66	HF ALL BAND TRANSCEIVER (IC- 718)	ICOM	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas)	KAB. MIMIKA	Ada
67	PEMANCAR TELEVISI SIARAN	PLISCH	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	KAB. MIMIKA	Ada
68	RADIO HF	CODAN	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas)	KAB. NABIRE	Ada
69	Portable Radio	Motorola	PT PLN (Persero)	KAB. NABIRE	Ada
70	Mobile Radio	Motorola	PT PLN (Persero)	KAB. NABIRE	Ada
71	Exiter/Transmitter	RVR	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	KAB. NABIRE	Ada
72	Pemancar Radio Siaran	RVR Elettronica	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	KAB. NABIRE	Ada
73	PEMANCAR TELEVISI SIARAN	PLISCH	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	KAB. NABIRE	Ada
74	RADIO KOMUNIKASI 2 ARAH	ALINCO	CV Inti Jaya	KAB. NABIRE	Ada
75	Portable Radio	Motorola	PT Pertamina (Persero)	KAB. NABIRE	Ada
76	Two Way Radio	ICOM	PT Menara Grand Papua (Wings Air)	KAB. NABIRE	Ada
77	Portable Radio	Motorola	PT Menara Grand Papua (Wings Air)	KAB. NABIRE	Ada
78	RADIO KOMUNIKASI 2 ARAH	YAESU	CV Panca Niaga	KAB. NABIRE	Ada
79	Radio Portable	Hytera	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	KAB. NABIRE	Ada
80	Handy Talkie	VOXTER	UD Agus Darmadi	KAB. NABIRE	Ada
81	ICOM MF/HF Marine Transceiver	ICOM	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Basarnas)	KAB. NABIRE	Ada
82	IP Microwave	Huawei	PT. Aplikanusa Lintasarta	KAB. BIAK NUMFOR	Ada
83	Radio Microwave Digital	Ceragon	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	KAB. BIAK NUMFOR	Ada
84	Radio Microwave Indoor Unit	Ceragon	Telekomunikasi Indonesia	KAB. BIAK NUMFOR	Ada

Tabel 3.12 Hasil Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi Tahun 2023

3. IK-3 Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Indikator Kinerja yang ketiga (IK-3) adalah layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. Mengingat penggunaan spektrum frekuensi radio antara lain untuk keperluan pertahanan negara, keselamatan umum, penyiaran, industri, penerbangan, maritim, dan navigasi, sehingga alokasi penggunaan spektrum radio harus diatur sesuai peruntukannya, tidak saling mengganggu, dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional.

Penanganan Gangguan Frekuensi Radio memiliki target kinerja yaitu 100% jumlah aduan gangguan SFR ditangani. Selama tahun 2023 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah menerima 2 (dua) pengaduan gangguan frekuensi radio pada subservice Penerbangan (*Aeronautical*) dan Frekuensi Penerbangan HF. Untuk dua pengaduan tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura telah melaksanakan monitoring lapangan sebagai bentuk tindak lanjut gangguan. Berikut capaian hasil penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Indikator Kinerja	Jumlah Aduan	Target Persentase	Aduan Tertangani	Realisasi Persentase
Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tertangani	2	100%	2	100%

Tabel 3.13 Capaian IK-3 Capaian Penanganan Aduan Gangguan SFR Tahun 2023

Selanjutnya hasil lengkap penanganan aduan spektrum frekuensi radio pada tahun 2023 di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Nama Pengadu	Tanggal Pengaduan	Tanggal Penanganan	Frekuensi Terganggu (MHz)	Hasil Penanganan
1.	Perum LPPNPI Cabang Nabire	27 Mei 2023	29 Mei 2023	122.3	Clear
2.	Perum LPPNPI Cabang Sentani	05 Juli 2023	06 Juli 2023	8.834	Clear

Tabel 3.14 Hasil Lengkap Penanganan Aduan Gangguan SFR Tahun 2023

Analisa Hasil Penanganan Gangguan:

- Untuk aduan tanggal 27 Mei 2023, setelah dilakukan monitoring di sekitaran Bandara Douw Aturure Nabire atau sekitar lokasi disinyalir terjadinya gangguan, selama 7 (tujuh) hari berturut – turut terpantau Clear pada frekuensi 122.3 yang digunakan untuk komunikasi Ground to Air Bandara Douw Aturure Nabire.
- Untuk aduan tanggal 05 Juli 2023, ini merupakan isu nasional di mana pada beberapa UPT di seluruh Indonesia mendapatkan laporan yang sama yaitu terjadinya interference pada frekuensi 8834 KHz, setelah melakukan koordinasi dengan Kantor AirNav Sentani dan Balai Monitor SFR Kelas I Tangerang (koordinator Mon. SFR HF) tidak lagi ditemukan gangguan tersebut saat dilakukan monitoring.
- Kesimpulan: Kedua gangguan tersebut statusnya Close dan dinyatakan selesai karena setelah dilakukan tindak lanjut tidak lagi ditemukan gangguan. Namun Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura secara berkala terus melakukan monitoring terhadap frekuensi – frekuensi tersebut sebagai Langkah pencegahan terjadinua gangguan di kemudian hari.

4. IK-4 Penertiban Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

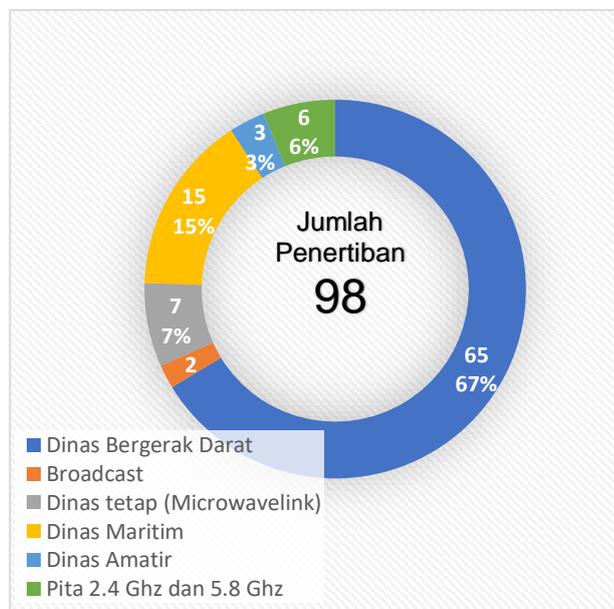
Tujuan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio adalah untuk memastikan bahwa penggunaan dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio sudah tertib dan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna frekuensi yang lain. Pada saat ditemukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan telah beberapa kali diberikan peringatan lisan maupun tertulis, apabila pengguna tetap menggunakan frekuensi radio tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan, maka Langkah terakhir dilaksanakan kegiatan operasi penertiban frekuensi radio.

Sesuai Nota Dinas Direktur Pengendalian Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 283/DJSDPPI.4/SP.03.04/02/ 2023 tanggal 6 Februari 2023 Tentang Penyampaian SK Monitoring dan Penertiban Nasional 2023. Penertiban Nasional pada Tahun 2023 dibagi menjadi 4 tahap dengan beberapa prioritas objek penertiban sebagai berikut:

No.	Waktu Pelaksanaan	Prioritas Objek Penertiban
1.	22 – 27 Mei 2023	Dinas Siaran (Radio FM)
2.	24 – 30 Juli 2023	Dinas tetap (<i>Microwavelink</i>)
3.	12 – 17 September 2023	Dinas Amatir, Dinas Maritim serta Dinas Bergerak Darat
4.	14 – 18 November	Penggunaan pita Frekuensi radio 2.4 Ghz dan pita 5.8 Ghz, vendor perangkat WLAN serta vendor/pedagang/pengguna perangkat penguat sinyal (repeater)

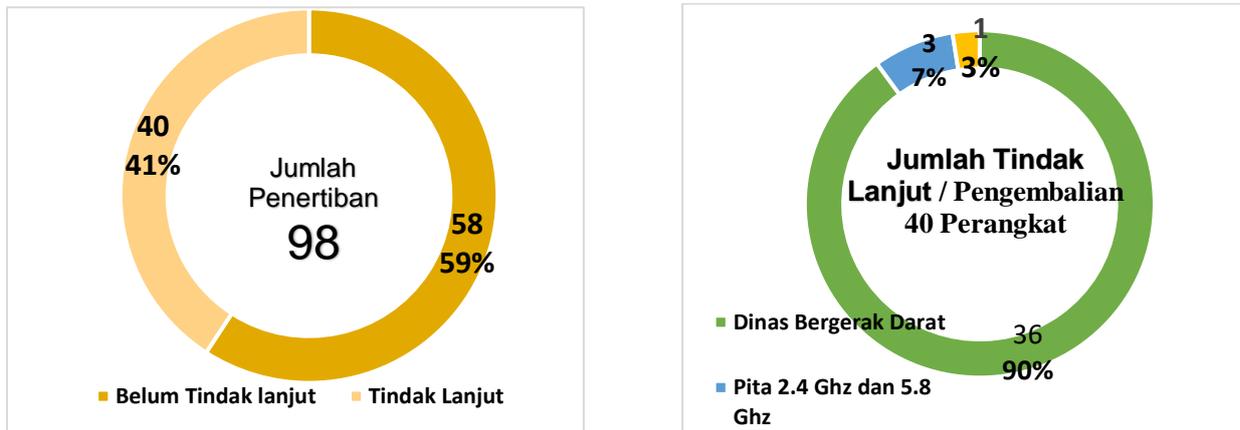
Tabel 3.15 Jadwal Pelaksanaan dan Objek Penertiban SFR Tahun 2023

Dari hasil Penertiban Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi, terdapat 98 penggunaan perangkat yang tidak memiliki ISR/tidak sesuai ketentuan teknis dengan rincian dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.9. Persentase Jumlah Hasil Penertiban Per Dinas Tahun 2023

Dari hasil penertiban frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi tahun 2023, beberapa pengguna sudah menindaklanjuti dengan mengurus ISR/menyesuaikan parameter teknis sebanyak 40 unit pengguna dengan grafik berikut:



Grafik 3.10. Persentase Jumlah Tindaklanjut Penertiban Tahun 2023

Target kinerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi adalah sebesar 93 %. Pada akhir tahun 2023 dengan segala potensi yang ada, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura memaksimalkan upaya tindak lanjut temuan penggunaan frekuensi ilegal sehingga dapat terealisasi sebesar 100% dan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 93%.

Indikator Kinerja	Jumlah Temuan	Target Persentase	Realisasi Ditetapkan	Realisasi Persentase
Pelanggaran Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Ditetapkan	98	93%	100%	100%

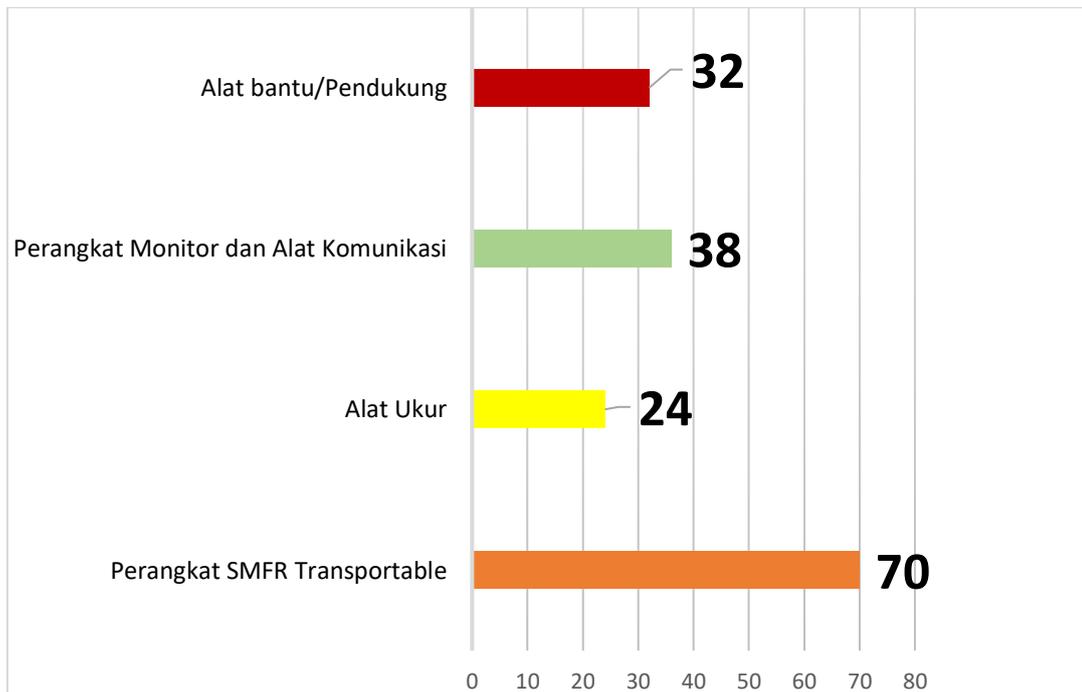
Tabel 3.16 IK-4 Capaian Penertiban Pelanggaran SFR Tahun 2023

5. IK-5 Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT

Pada tahun 2023 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura memiliki sasaran kinerja berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur sebesar 95 %. Tujuan sasaran kinerja ini untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat monitor/ukur dapat berfungsi dengan baik dan terawat.

Perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur terbagi atas 2 (dua) jenis perangkat, yaitu perangkat utama dan perangkat pendukung untuk melakukan kegiatan monitoring, pengukuran, dan pencarian spektrum frekuensi radio. Secara kesisteman, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura memiliki 3 (tiga) macam perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur, yaitu perangkat sistem monitoring dan pencarian spektrum frekuensi radio bergerak, perangkat sistem monitoring spektrum frekuensi radio transportable, dan perangkat monitoring dan pengukuran spektrum frekuensi radio portable.

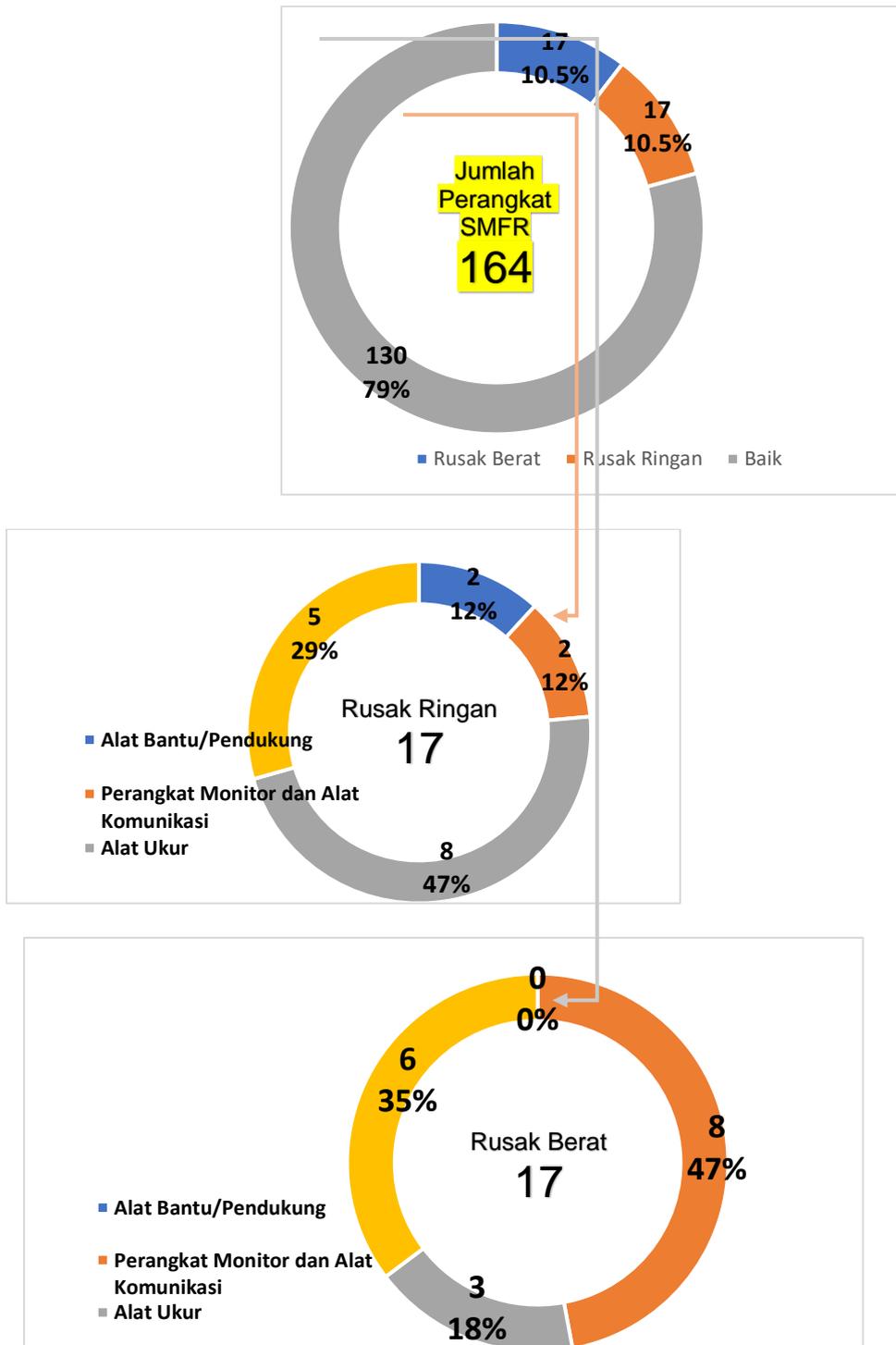
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura melakukan perbaikan dan pemeliharaan unit alat ukur spectrum analyzer (SPA) melalui pihak ketiga yaitu PT. Malpi. Penggantian LCD Perangkat Receiver AOR dan Penggantian Connector Antena pada PT. Tricom Frekuensi. Berikut grafik data peralatan SFMR Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura Tahun 2023.



Grafik 3.11. Sebaran Perangkat SMFR Tahun 2023

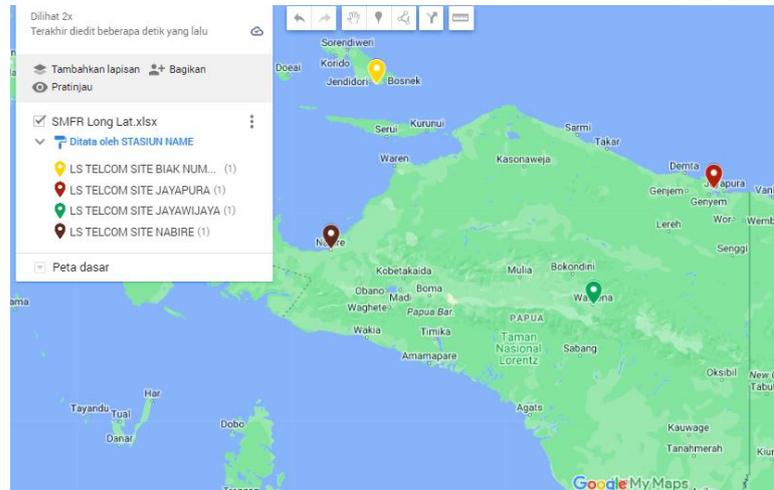
Dari Perangkat SMFR yang dimiliki oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura terdapat 17 Perangkat dalam kondisi **Rusak Berat**, 17 Perangkat dalam kondisi **Rusak Ringan** dan selebihnya sebanyak 130 Perangkat dalam kondisi **Baik**.

Data kondisi perangkat SMFR di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.12. Kondisi Perangkat SMFR Tahun 2023

Berikut merupakan sebaran dan kondisi perangkat SMFR Transportable yang ada di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura, tersebar di 4 Kabupaten pada gambar dan tabel yang ada di bawah ini.

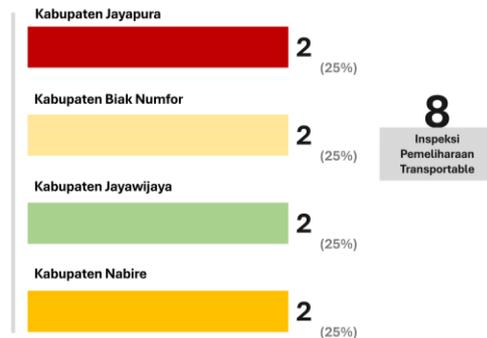


Gambar 3.6. Sebaran Perangkat SMFR di Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura

Nama Stasiun	Lokasi	Longitude	Latitude	Kondisi Perangkat
LS Telcom Site Jayapura	Kab. Jayapura	140.5121	-2.56557	Kondisi Sering Off dikarenakan kendala kelistrikan pada Perangkat Utama
LS Telcom Biak Numfor	Kab Biak Numfor	136.0978	-1.18825	Kondisi On
LS Telcom Site Jayawijaya	Kab. Jayawijaya	138.9486	-4.09493	Kondisi On
LS Telcom Site Nabire	Kab. Nabire	135.5035	-3.35677	Kondisi Off,dikarenakan kendala pada Perangkat Utama Rusak pada Januari - November

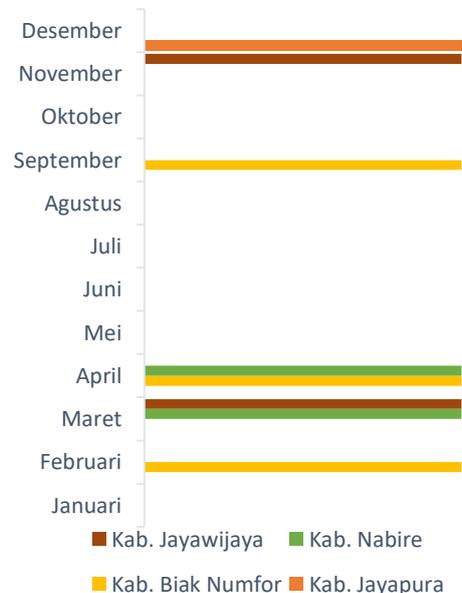
Tabel 3.17 IK-4 Kondisi Perangkat SMFR Transportable pada Tahun 2023

Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura pada tahun 2023 melaksanakan 8 kali kegiatan inspeksi pemeliharaan transportable di 4 kabupaten tersebut. Sebaran jumlah kegiatan di masing – masing kabupaten dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.13. Pelaksanaan Inspeksi Pemeliharaan SMFR Transportable Tahun 2023

Sedangkan timeline pelaksanaan inspeksi pemeliharaan transportable sepanjang tahun 2023 bisa dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.14. Timeline Inspeksi Pemeliharaan SMFR Transportable Tahun 2023

Dari uraian diatas maka dari target 95% berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur, tercapai sebesar 98,17%, dari 164 perangkat terdapat 34 perangkat yang tidak dapat berfungsi optimal.

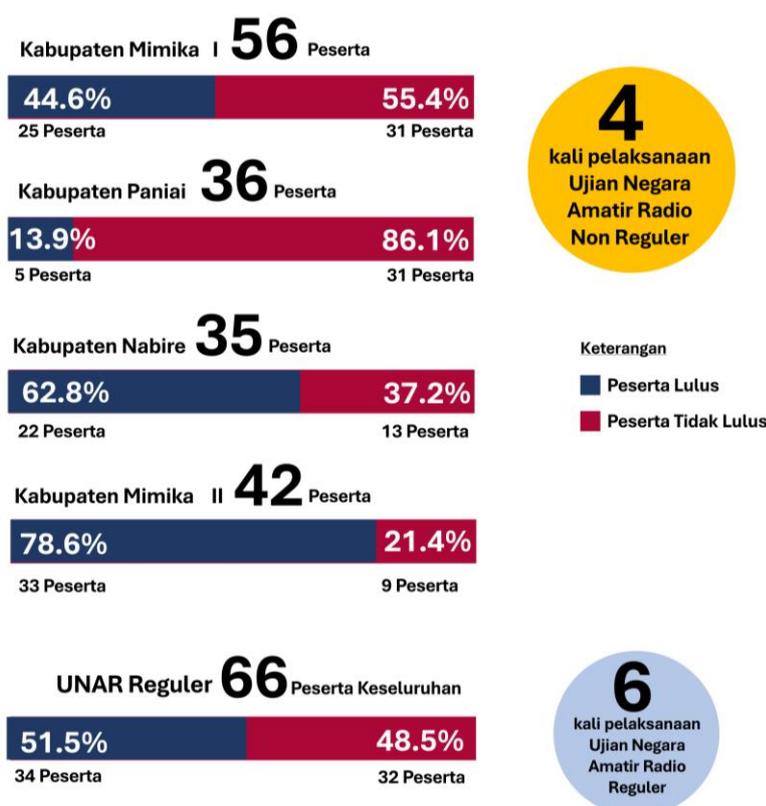
Indikator Kinerja	Target Persentase	Realisasi Persentase
Berfungsinya Perangkat Pendukung dan alat monitor/ukur di UPT	93%	98.17%

Tabel 3.18 IK-5 Capaian Berfungsinya Perangkat Pendukung dan Alat Monitor Tahun 2023

6. IK-6 Peserta Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT

Pelaksanaan sertifikasi operator radio berbasis CAT di UPT dilaksanakan melalui Ujian Nasional Amatir Radio (UNAR) merupakan rangkaian dari sertifikasi dan uji kompetensi untuk mendapatkan Izin Amatir Radio (IAR). Setelah mendapatkan IAR, penggiat perorangan amatir radio diperkenankan untuk mengudara atau menggunakan spektrum frekuensi radio yang telah dialokasikan untuk amatir radio sesuai dengan tingkatan dan ketentuan teknis yang berlaku.

Pada tahun 2023, target pelaksanaan UNAR di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Kelas II Jayapura yaitu sebanyak 10 kali pelaksanaan. Untuk mencapai target tersebut, UNAR dilaksanakan secara reguler di Kantor sebanyak 6 kali dan secara Non Reguler (*jadwal menyesuaikan*) sebanyak 4 kali di luar kota sehingga mencapai target 10 kali pelaksanaan. Hasil pelaksanaan UNAR Reguler dan Non Reguler dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

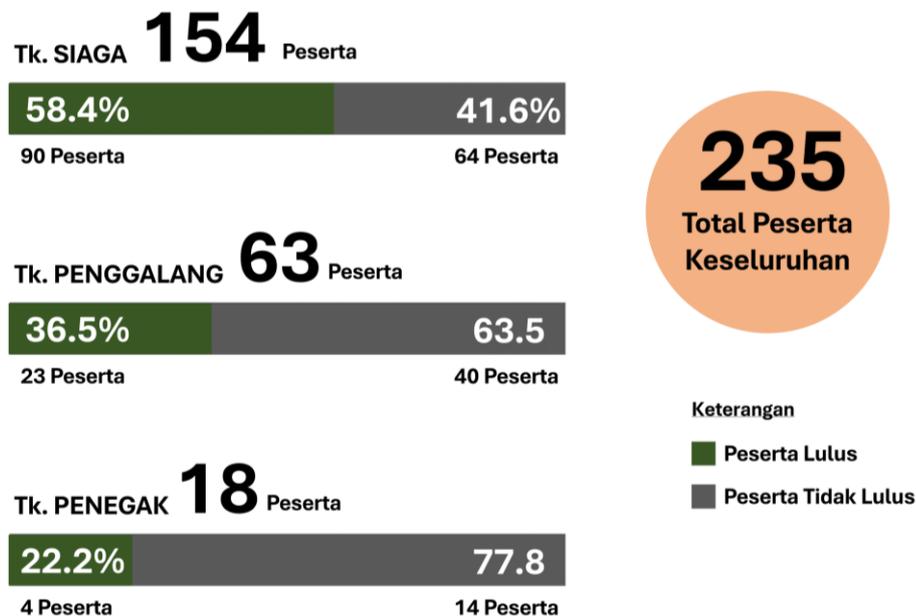


Grafik 3.15. Hasil Pelaksanaan UNAR Reguler dan Non Reguler Tahun 2023

Dari grafik di atas, dapat dilihat minat peserta UNAR Non Reguler di Kabupaten Mimika I lebih banyak dengan total 56 peserta dibanding pelaksanaan yang lainnya. Jika dilihat persentase kelulusan, Kabupaten Mimika II lebih banyak dengan tingkat kelulusan 78.6% atau 33 dari 42 peserta. Sedangkan Kabupaten Paniai menjadi lokasi pelaksanaan UNAR Non Reguler dengan persentase kelulusan paling kecil yaitu hanya 13.9% atau hanya 5 dari 36 peserta yang mendaftarkan diri mengikuti UNAR.

Sementara itu untuk UNAR Reguler setelah dilaksanakan sebanyak 6 kali, jumlah peserta keseluruhan yang hadir berjumlah 66 orang dengan tingkat kelulusan sebesar 51.5% atau 34 dari 66 peserta.

UNAR terbagi ke dalam tiga tingkatan yaitu Tingkat Siaga, Tingkat Penggalan dan Tingkat Penegak. Masing – masing peserta yang mengikuti UNAR disesuaikan dengan tingkatan yang akan diikuti. Pada tahun 2023, total keseluruhan peserta yang mengikuti UNAR Reguler dan Non Reguler yaitu berjumlah 154 peserta. Tingkat kelulusan di masing – masing tingkatan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.16. Hasil Pelaksanaan UNAR Berdasarkan Tingkatan Peserta

Jika dilihat dari grafik di atas, jumlah peserta pada tingkat Siaga yang merupakan tingkatan paling awal lebih banyak dibanding tingkat Penggalan dan tingkat Penegak dengan jumlah 154 peserta. Begitu juga dengan tingkat kelulusan pada masing – masing tingkatan, dapat dilihat bahwa tingkat Siaga memiliki persentase kelulusan paling tinggi yaitu 58.4% diikuti tingkat penggalan dengan 36.5% dan terakhir tingkat Penegak yang memiliki tingkat kelulusan sebesar 22.2%.

Hasil ini mencerminkan tingkatan kesulitan UNAR yang diikuti peserta Ketika akan berpindah / naik tingkatan, memiliki soal ujian yang lebih sulit dibanding tingkat sebelumnya sehingga peserta harus benar – benar mempersiapkan diri dalam mengikuti UNAR.

Hasil capaian pelaksanaan UNAR berbasis CAT terhadap indikator kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target Kegiatan	Target Persentase	Realisasi Kegiatan	Realisasi Persentase
Pelaksanaan Kegiatan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR)	10	100%	10	100%

Tabel 3.19 IK-6 Capaian Pelaksanaan UNAR Berbasis CAT pada Tahun 2023

7. IK-7 Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

Pendampingan Piutang Pada Tahun 2023 di wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura memiliki target sebesar 100%. Dengan telah diterapkannya e-licensing dan penerapan tanda tangan digital dalam perizinan spektrum frekuensi radio, maka klien/para pengguna frekuensi radio yang sudah memiliki akun *e-licensing* akan menerima SPP BHP frekuensi radio dan ISR melalui email sehingga UPT tidak lagi mengirimkan SPP dan salinan ISR kepada pengguna.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Upaya penanganan piutang dengan menghubungi klien (pihak perusahaan atau instansi pemerintah) melalui telepon seluler maupun layanan pesan singkat WhatsApp untuk mengirimkan tagihan SPP BHP sebelum jatuh tempo pembayaran, jika SPP BHP belum dibayar dan telah terbit Surat Peringatan (SP) 1/2/3 dan SP terakhir maka petugas akan mengunjungi klien tersebut untuk mengetahui kendala keterlambatan pembayaran SPP BHP.

NO	Bulan	Jumlah Penerbitan Tagihan BHP						Jumlah Penanganan Piutang Dihubungi			Capaian (%) (Total Piutang dihubungi / Total Penerbitan Tagihan BHP)
		SPP	ST-1	ST-2	ST-3	ST-T	Total	Lewat Media	Datang Langsung	Total	
1	Januari	0	1	1	0	3	5	2	3	5	100%
2	Februari	7	1	1	0	5	14	1	13	14	100%
3	Maret	8	3	2	0	7	20	4	13	17	85%
4	April	8	0	0	3	5	16	4	11	15	94%
5	Mei	9	1	0	3	5	18	6	11	17	94%
6	Juni	18	2	0	0	7	27	17	9	26	96%
7	Juli	4	0	0	0	6	10	5	5	10	100%
8	Agustus	11	1	0	0	5	17	7	7	14	82%
9	September	13	0	1	0	4	18	8	10	18	100%
10	Oktober	10	2	0	1	4	17	10	6	16	94%
11	November	7	1	1	0	5	14	7	7	14	100%
12	Desember	4	2	1	0	4	11	2	8	10	91%
Jumlah		99	14	7	7	60	187	73	103	176	94%

Tabel 3.20 IK-6 Rincian Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL

Indikator Kinerja	Target Persentase	Realisasi Persentase
Capaian Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	94%

Tabel 3.21 IK-6 Capaian Pendampingan Piutang SPP BHP Tahun 2023

8. IK-8 Sosialisasi Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat

Sosialisasi merupakan wadah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait peraturan dan proses perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio legal dan sesuai peruntukannya serta menciptakan penggunaan spektrum frekuensi radio yang legal dan tidak saling mengganggu. Berikut daftar pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik di Tahun 2023.

No.	Tema Sosialisasi	Lokasi Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan
1	Fungsi Pemerintah dalam Pengawasan dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi Perangkat	Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya	30 Peserta	30 Agustus 2023
2	Peran Penggunaan Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi dalam Mendukung Transformasi di Era Digital	Hotel Grand Papua, Sentani, Kabupaten Jayapura	26 Peserta	25 Oktober 2023

Tabel 3.22 Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Selama mengikuti Sosialisasi, para peserta mendapatkan materi dari Tim Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura serta Narasumber dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang turut datang langsung ke Papua. Secara garis besar, materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi berada dalam lingkup tentang bahaya penggunaan alat/perangkat telekomunikasi ilegal atau tidak berizin, cara menentukan perangkat yang tersertifikasi maupun yang tidak, serta pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio di era digitalisasi saat ini.

Berikut capaian indikator untuk pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja	Target Peserta	Target Persentase	Realisasi Peserta	Realisasi Persentase
Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pelayanan Publik	50	100%	56	112%

Tabel 3.23 IK-8 Capaian Sosialisasi Pelayanan Publik pada Tahun 2023

Selain Sosialisasi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura juga melakukan survei IIPP dan IKM, dengan jumlah responden sebanyak 11 responden, dengan sekala IKM 3,49 dan sekala IIPP 8,79, sehingga nilai capaian survey 100%.

9. IK-9 Bimbingan Teknis SRC/LRC

Dalam rangka mendukung pengguna frekuensi khususnya pada alokasi maritim, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan bimbingan teknis Sertifikasi Operator Radio (*Short Range Certificate / SRC*). Pada Tahun 2023 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura menargetkan penerbitan sertifikat SRC-LRC MOTS adalah sebanyak 19 sertifikat. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura menggelar Bimtek SRC di 2 Kabupaten dan 1 Kota yaitu, Kabupaten Biak, Kabupaten Mimika dan Kota Jayapura bekerjasama dengan stakeholder terkait frekuensi maritim. Berikut daftar pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis SRC/LRC di tahun 2023.

No.	Tema Sosialisasi	Lokasi Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Tanggal Pelaksanaan
1	Sadar Penggunaan Frekuensi Maritim untuk Keselamatan Pelayaran	Hotel MaxOne, Kota Jayapura	30 Peserta	27 Juni 2023
2		Hotel Horison Ultima, Timika, Kabupaten Mimika	13 Peserta	21 September 2023
3		Swissbel-Hotel Cenderawasih, Kabupaten Biak Numfor	25 Peserta	20 Desember 2023

Tabel 3.24 Pelaksanaan Bimtek SRC/LRC Tahun 2023

Selama mengikuti Sosialisasi, para peserta mendapatkan materi dari Tim Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura serta Narasumber lintas instansi yang memiliki kewenangan dalam menyampaikan materi di bidang komunikasi radio maritim

Kegiatan Bimbingan teknis tersebut diikuti total keseluruhan 68 peserta dengan jumlah penerbitan sertifikat sejumlah 64. Dengan demikian, capaian pelaksanaan Bimbingan Teknis SRC/LRC dapat dilihat pada tabel berikut.

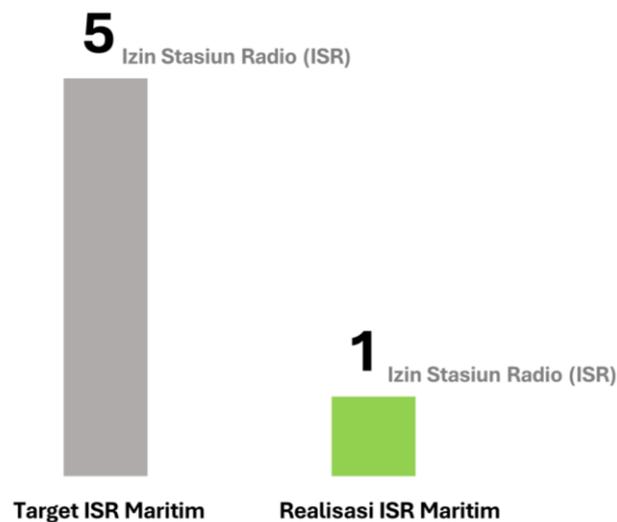
Indikator Kinerja	Target Sertifikat	Target Persentase	Realisasi Sertifikat	Realisasi Persentase
Jumlah Sertifikat Terbit Setelah Kegiatan Bimtek SRC/LRC	19	100%	64	337%

Tabel 3.25 IK-9 Capaian Bimtek SRC/LRC Tahun 2023

10.IK-10 ISR Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN

Dalam rangka tertib perizinan bidang maritim Balai Monitor Spektrum Frekuensi pada tahun 2023 gencar melakukan pendekatan kepada nelayan-nelayan dan pengguna Frekuensi Radio Maritim untuk melakukan pengurusan Izin Stasiun Radio. Kegiatan ini diwujudkan dengan melaksanakan MOTS (*Maritim On The Spot*), kegiatan ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung pengguna dan melakukan sosialisasi di tempat serta memberikan fasilitas pengurusan Izin di tempat sosialisasi tersebut.

Berikut grafik pengurusan ISR Maritim di tahun 2023.



Grafik 3.17. Realisasi Pengurusan ISR Maritim Tahun 2023

Dari Kegiatan MOTS yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura pada tahun 2023, hanya dapat dicapai sebanyak 1 ISR atau sebesar 20% sehingga capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Target ISR Maritim	Target Persentase	Realisasi ISR Maritim	Realisasi Persentase
Jumlah ISR Maritim yang Terbit	5	100%	1	20%

Tabel 3.26 IK-10 ISR Maritim Pada Tahun 2023

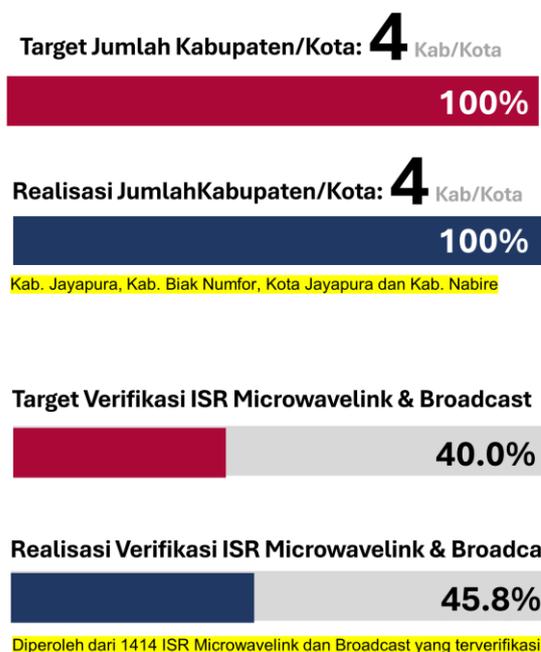
Jika dilihat dari capaian pada tabel di atas, realisasi ISR Maritim yang didapatkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor utama yang menyebabkan target tidak tercapai adalah kurangnya kesadaran dari para agen kapal dan nelayan dalam melakukan pengurusan Izin Stasiun Radio. Faktor lain yang menjadi penyebab yaitu kesulitan agen kapal dan nelayan dalam mengakses dokumen persyaratan yang harus diurus di instansi lain yang berwenang dalam pengurusan dokumen komunikasi radio maritim.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura akan terus berusaha meningkatkan kinerja, koordinasi dan kolaborasi agar capaian tersebut lebih baik di waktu yang akan datang.

11.IK-11 Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwavelink dan Penyiaran

Indikator Kinerja Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwavelink dan Penyiaran merupakan terobosan baru Ditjen SDPPI melalui Direktorat Operasi Sumber Daya untuk meningkatkan pelayanan yang prima kepada klien melalui akurasi data di lapangan. Di tahun 2023.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura memiliki target minimal 4 Kabupaten/Kota di wilayah kerja dan sekurang – kurangnya 40% dari total ISR Microwavelink dan Broadcast harus terverifikasi titik koordinatnya. Berikut grafik pelaksanaan verifikasi data koordinat ISR Microwavelink dan Broadcast tahun 2023.



Grafik 3.18. Pelaksanaan Verifikasi Koordinat ISR Microwavelink dan Broadcast

Dengan demikian, capaian indikator verifikasi data koordinat ISR Microwavelink dan Broadcast dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Indikator Kinerja	Target Kab/Kota	Target Persentase ISR	Realisasi Kab/Kota	Realisasi Persentase ISR
Jumlah Verifikasi Data Koordinat ISR Microwavelink dan Broadcast	4	40%	4	45.8%

Tabel 3.27 IK-11 Verifikasi Data Koordinat ISR Pada Tahun 2023

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

REALISASI ANGGARAN

Untuk menjalankan berbagai macam kegiatan yang telah direncanakan, diperlukan sumber dana, sarana serta prasarana dan juga SDM yang optimal. Adapun alokasi dan sumber pembiayaan pada tahun anggaran 2023 yang telah digunakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura untuk membiayai berbagai kegiatan dimaksud sudah mencapai kinerja yang optimal dengan beberapa uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Belanja Pegawai	2.416.147.000	2.393.266.190	99.05 %
2.	Belanja Barang	10.543.904.000	10.290.880.420	97.60 %
3.	Belanja Modal	4.725.151.000	4.517.944.530	95.61 %
TOTAL		17.685.202.000	17.202.091.140	97.27%

Tabel 3.28. Tabel Alokasi Belanja Tahun 2032 Berdasarkan Sumber Dana

Alokasi Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura terdapat dua sumber dana yaitu Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1.	Rupiah Murni (RM)	4.722.596.000	4.662.873.634	98.74 %
2.	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	12.962.606.000	12.539.217.506	96.73 %
TOTAL		17.685.202.000	17.202.091.140	97.27%

Tabel 3.29. Tabel Alokasi Belanja berdasarkan Sumber Dana Tahun 2023

Analisa Pelaksanaan Alokasi Anggaran:

1. Pada tahun 2023, alokasi Belanja Barang memiliki nilai yang lebih besar dibanding Belanja Pegawai dan Belanja Modal. Namun secara persentase penyerapan anggaran, Belanja Pegawai memiliki nilai yang lebih besar;
2. Realisasi penggunaan alokasi anggaran pada sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki angka lebih kecil yaitu 96.73 % dibandingkan dengan realisasi pada sumber Rupiah Murni (RM) yang pada akhir tahun 2023 berada pada persentase 98.74 %.
3. Secara keseluruhan, realisasi penggunaan anggaran Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura berada pada angka 97.27 %. Angka ini cukup baik jika dibandingkan dengan perolehan tahun sebelumnya 2022 di mana hanya memperoleh realisasi akhir 91.89 %.

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PERSURATAN

Administrasi kepegawaian pada dasarnya adalah proses yang paling dasar dalam pengumpulan informasi yang berhubungan dengan sistem kepegawaian dimana hal ini dilakukan dengan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan kelengkapan atau perlengkapan dari administrasi umum yang berhubungan dengan seorang pegawai.

Pengelolaan administrasi kepegawaian diarahkan pada terwujudnya penataan pegawai sesuai kompetensi melalui pengorganisasian kepegawaian dan pembinaan kepegawaian untuk memaksimalkan potensi pegawai dan peningkatan kesejahteraan. Penetapan tugas dan tanggungjawab pegawai dilakukan dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi pegawai dengan pola kerja yang memungkinkan dapat saling bekerjasama untuk memudahkan dalam pencapaian target kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura.

Pada tahun 2023, kegiatan administrasi kepegawaian yang telah oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura yang memiliki sumber daya manusia sejumlah 36 Pegawai yang terdiri dari 17 pegawai ASN dan 19 pegawai Non ASN adalah :

1. Pengusulan Kenaikan Pangkat

Selama tahun 2023 telah dilakukan pengusulan kenaikan pangkat sebanyak 3 orang untuk periode kenaikan pangkat April 2023 dan 2 orang untuk periode kenaikan pangkat Oktober 2020.

No.	Nama	Pangkat Lama		Pangkat Baru		Keterangan
		Pangkat/ Gol.Ruang	TMT	Pangkat/ Gol.Ruang	TMT	
1.	Faby Andreas Ratulangi 196902221992031002	Penata Muda TK.I / IIIb	1/10/2014	Penata/IIIC	1/10/2023	
2.	Arfan Trino Lesmana 198511032011011011	Penata Muda /IIIa	1/4/2019	Penata Muda TK.I / IIIb	1/4/2023	
3.	Gasferd Rikardo Kaway 199210082019021004	Penata Muda /IIIa	1/2/2019	Penata Muda TK.I / IIIb	1/4/2023	
4.	Cristie Shintia Merauje 198605052015062001	Pengatur TK I /IId	1/10/2019	Penata Muda/IIIa	1/10/2023	
5.	Miskun 197304262007011004	Pengatur/ IIc	1/10/2016	Pengatur TK I /IId	1/4/2023	

Tabel 3.30. Tabel Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Tahun 2023

2. Kenaikan Gaji Berkala

Daftar penyelesaian kenaikan gaji berkala Pegawai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura Tahun 2023 adalah :

No.	Nama	Pangkat/ Gol.Ruang	TMT
1.	Rachim Pribadi 197408051993031001	Pembina /IVa	1/3/2023
2.	Ansar Kaluku 196607261990031003	Penata TK.I /IIIId	1/3/2023
3.	Anugrah Agung Perdana 198407222011011006	Penata TK.I /IIIId	1/1/2023
4.	Faby Andreas Ratulangi 196902221992031002	Penata /IIIc	1/10/2023
5.	Zainal Asri 198605282009011005	Penata Muda TK I/IIIb	1/1/2023
6.	Arfan Trino Lesmana 198511032011011011	Penata Muda TK I/IIIb	1/1/2023
7.	Cristie Shintia Merauje 198605052015062001	Pengatur Muda TK I/IIId	1/6/2023
8.	Miskun 197304262007011004	Pengatur Muda TK I/IIId	1/1/2023

Tabel 3.31. Tabel Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tahun 2023

3. Pengelolaan Administrasi Persuratan

Pengelolaan administrasi persuratan di Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura melewati proses penerimaan dan atau pengiriman surat dilakukan secara konvensional dan melalui aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Maya (SiMaya). Surat dinas atau Nota Dinas yang berasal dari internal Kementerian Kominfo diterima secara daring melalui SiMaya.

Aktifitas penerimaan dan penerbitan surat menyurat selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Bulan	Surat Masuk	Surat Keluar	
			Surat Dinas / Nota Dinas	Surat Tugas
1.	Januari	52	71	12
2.	Februari	54	50	19
3.	Maret	53	38	17
4.	April	13	56	8
5.	Mei	46	65	28
6.	Juni	46	47	17
7.	Juli	63	62	14
8.	Agustus	53	43	14
9.	September	63	48	18
10.	Oktober	44	41	12
11.	November	13	79	20
12.	Desember	15	37	9
JUMLAH		515	637	188

PENGELOLAAN BMN

Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari aset milik pemerintah pusat, yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan BMN adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan sampai dengan pemusnahan dan penghapusan, dimana seluruh kegiatan tersebut ditatausahakan dengan baik disertai dengan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Ditjen SDPPI telah melakukan kegiatan penatausahaan BMN Tahun 2023. Kegiatan penatausahaan BMN yang dilakukan meliputi :

- Pembukuan, terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang.
- Inventarisasi, terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMN.
- Pelaporan, terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan.

Balai Monitor SFR Kelas II Jayapura sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Ditjen SDPPI telah melakukan kegiatan penatausahaan BMN Tahun 2023. Pelaksanaan penatausahaan BMN ini dilakukan melalui aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara). SIMAK BMN dan SAK adalah subsistem dari SAI. Dalam konteks manajerial SIMAK BMN melaporkan arus barang, dan SAK melaporkan arus uang. Kedua subsistem tersebut jika berjalan secara simultan maka dapat melakukan check and balance antara arus uang dan arus barang.

No.	Uraian	Nominal
Aset Lancar		
1.	Persediaan	80.524.733
2.	Bahan untuk pemeliharaan	71.910
Aset Tetap		
3.	Tanah	16.912.841.000
4.	Peralatan dan Mesin	28.722.300.992
5.	Gedung dan Bangunan	5.233.327.403
6.	Irigasi	43.776.000
7.	Jaringan	207.624.000
8.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.905.353.647
9.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(18.506.140.566)
10.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.026.979.096)
11.	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(9.168.250)
12.	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(207.624.000)
Aset Lainnya		
12.	Software	2.135.930.024
13.	Lisensi	139.927.070
14.	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintah	2.261.189.566
15.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintah	(2.261.189.566)
16.	Akumulasi Amortisasi Software	(1.456.391.266)
17.	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(126.457.295)
Total Aset		35.048.916.306

Tabel 3.33 Neraca BMN Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura Tahun 2023

1. Pengadaan Barang (Belanja Modal) Tahun 2023

Untuk menunjang kegiatan operasional kantor, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura melakukan pengadaan barang sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi
1.	Pengadaan Meja Tenis (Gamedia Jayapura)	5.525.000
2.	Pengadaan Printer	9.000.000
3.	Pengadaan Perangkat Komunikasi (PT.Malpi Network Basari)	121.878.000
4.	Pengadaan Perangkat Monitor (Malpi)	84.915.000
5.	Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung (PT. SOLUSI PRIMA INFORMATIKA)	51.820.000
6.	Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung (CV. SAGITA FURNITURE)	195.740.000
7.	Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung (PT.SOLUSI PRIMA INFORMATIKA)	158.700.000
8.	Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung (CV. SAGITA FURNITURE)	119.364.000
9.	Pengadaan Printer (PT. AYOOKLIK AIRMAS PERKASA)	129.800.000
TOTAL		876.742.000

Tabel 3.34 Pengadaan Barang Tahun 2023

2. Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura pada tahun 2023 melakukan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang masa manfaatnya sudah habis dan dalam kondisi Rusak Berat berdasarkan Surat Persetujuan penjualan dari Kementerian Keuangan Nomor: S-62/MK.6/KNL.17/02/2022, tanggal 16 November 2022 Perihal *Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika*, Berikut data penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura Tahun 2023, data terlampir pada tabel berikut:

No.	Kode Barang	Nama Barang	Merk	Gambar
1.	3020105007	Mobil Monitoring Frekuensi Unit	Mitsubishi L200	
2.	3020105007	Mobil Monitoring Frekuensi Unit	Mitsubishi Type FE104/Microbus	
3.		BMN BERUPA SELAIN TANAH DAN BANGUNAN (Meubeler)Sebanyak 259 Barang		 

				     
--	--	--	--	--

Tabel 3.35 Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2023

04 PENUTUP



PENUTUP

Dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura selama tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa:

1. Program kerja tahun anggaran 2023 secara umum berjalan lancar dan sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan serta dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Masih perlu kegiatan sosialisasi tentang tugas dan fungsi pokok Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Jayapura kepada masyarakat Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah, sehingga pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dapat dikurangi.
3. Tindakan terhadap pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio sudah dilakukan sesuai Undang - Undang untuk memberikan sanksi dalam rangka tertib penggunaan spektrum frekuensi radio sekaligus memotivasi untuk lebih taat pada peraturan yang berlaku.
4. Dengan jumlah sumber daya manusia dan perangkat monitoring yang sudah memadai, maka perlu peningkatan jumlah kegiatan tupoksi untuk tiap kabupaten / kota dalam memaksimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian Spektrum frekuensi Radio.
5. Perlunya menentukan formula yang tepat untuk kegiatan Pencegahan Piutang agar target capaian dapat tercapai pada tahun-tahun selanjutnya.
6. Perlunya menentukan formula yang tepat untuk kegiatan MOTS-IKRAN agar target capaian dapat tercapai pada tahun-tahun selanjutnya.

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2023



MONITORING PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO



PEMERIKSAAN STASIUN RADIO MICROWAVELINK



OPERASI PENERTIBAN NASIONAL SFR TAHUN 2023



PENANGANAN GANGGUAN SFR TAHUN 2023



UJIAN NEGARA AMATIR RADIO (UNAR)



PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS BROADCAST



BIMBINGAN TEKNIS SRC/LRC





#FrekuensiSatukanNegeri